

**PERKEMBANGAN EKONOMI
DAN KEUANGAN DAERAH**

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Triwulan IV - 2005

**Kantor Bank Indonesia
Batam**

Visi Bank Indonesia

Menjadi lembaga bank sentral yang dapat dipercaya secara nasional maupun internasional melalui penguatan nilai-nilai yang dimiliki serta pencapaian inflasi yang rendah dan stabil

Misi Bank Indonesia

Mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah melalui pemeliharaan kestabilan moneter dan pengembangan stabilitas sistem keuangan untuk pembangunan jangka panjang negara Indonesia yang berkesinambungan

Visi Kantor Bank Indonesia Batam

Menjadi lembaga yang kredibel melalui kebijakan yang berhasil guna, peningkatan kompetensi dan kemitraan strategis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan

Misi Kantor Bank Indonesia Batam

Merupakan bagian jaringan Bank Indonesia yang berperan dalam perencanaan, pelaksanaan fungsi dan kebijakan BI serta melaksanakan tugas-tugas pendukung lainnya di daerah

Kantor Bank Indonesia Batam
Jl. Engku Putri - Batam Center
B A T A M
Telp. 0778 - 462280
Fax. 0778 - 462254

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dengan kuasanya maka Laporan Perkembangan Ekonomi dan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Triwulan IV-2005 dapat diselesaikan. Laporan ini merupakan kajian rutin triwulanan yang disusun oleh Kantor Bank Indonesia Batam, guna memenuhi kebutuhan intern Bank Indonesia serta kebutuhan ekstern mengenai berbagai informasi yang berkaitan dengan perkembangan indikator perekonomian daerah antara lain di bidang Makro Ekonomi, Moneter, Perbankan dan Keuangan Daerah. Laporan Perkembangan Ekonomi dan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Riau periode triwulan IV-2005 ini sebagai kajian berkala yang meliputi data-data dan kajian wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang resmi terbentuk sejak 1 Juli 2004.

Data dan informasi yang terdapat pada laporan ini diperoleh dari beberapa pihak, diantaranya Badan Pusat Statistik, Pemerintah Kota Batam, dinas-dinas terkait termasuk dari Bank Indonesia

Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan laporan ini. Kami berharap agar hubungan baik ini tetap terjaga dan dapat ditingkatkan lagi di masa yang akan datang. Disamping itu kami juga mengharapkan masukan serta penyediaan data yang lebih lengkap dari semua pihak agar kualitas dari hasil laporan ini lebih baik lagi untuk kedepannya.

Akhir kata semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu melimpahkan rahmat-Nya serta memberikan kemudahan kepada kita semua dalam upaya meningkatkan kinerja untuk pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Batam, Februari 2006

ttd

Tindomora Siregar

Pemimpin

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GRAFIK	iv
DAFTAR LAMPIRAN.....	v
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	1
BAB I. PERKEMBANGAN MAKRO EKONOMI PROPINSI KEPULAUAN RIAU	
1. Kondisi Umum	6
2. Sisi Permintaan	7
3. Sisi Penawaran.....	9
4. Ketenagakerjaan	12
5. Penanaman Modal.....	13
6. Pariwisata	15
7. Pedagang Valuta Asing	17
8. Penduduk.....	18
BAB II. PERKEMBANGAN INFLASI	
1. Kondisi Umum	19
2. Inflasi Berdasarkan Kelompok Komoditi.....	22
BAB III. PERKEMBANGAN MONETER, PERBANKAN DAN SISTEM PEMBAYARAN	
1. Kondisi Umum	23
2. Moneter	24
3. Perbankan	26
4. Sistem Pembayaran.....	39
BAB IV. KEUANGAN DAERAH PERIODE TAHUN 2005	
1. APBD Provinsi Kepulauan Riau	46
2. APBD Kota Batam	47

3. APBD Kab Tanjung Balai Karimun	49
4. APBD Kota Tanjung Pinang	51
5. RAPBD Provinsi Kepulauan Riau	52

BAB V. PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1	Pertumbuhan PDRB Provinsi Kepri menurut penggunaan.....	7
Tabel 1.2	Distribusi Persentase PDRB Provinsi Kepri menurut penggunaan	8
Tabel 1.3	PDRB Provinsi Kepri menurut penggunaan atas dasar harga konstan	9
Tabel 1.4	PDRB Provinsi Kepri menurut penggunaan atas dasar harga berlaku	9
Tabel 1.5	Pertumbuhan PDRB Provinsi Kepri menurut lapangan usaha....	10
Tabel 1.6	PDRB Provinsi Kepri atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha	10
Tabel 1.7	PDRB Provinsi Kepri menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku	11
Tabel 1.8	Distribusi PDRB Provinsi Kepri menurut lapangan usaha.....	11
Tabel 1.9	Perkembangan jumlah tenaga kerja Kota Batam	13
Tabel 1.10	Perkembangan rencana investasi asing (PMA) di Batam.....	13
Tabel 1.11	Perkembangan jumlah kunjungan wisatawan manca negara ke Batam	16
Tabel 1.12	Perkembangan negara asal kunjungan wisatawan manca negara ke Batam	16
Tabel 1.13	Penyebaran Penduduk Mmrt Kec dan Jenis Kelamin di Kota Batam	18
Tabel 2.1	Perkembangan Inflasi Kota Batam	21
Tabel 2.2	Tingkat Inflasi dan Andil Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran	21
Tabel 2.3	Perkembangan inflasi kota Batam menurut kelompok komoditi.	22
Tabel 3.1	Perkembangan Uang Giral dan Kuasi Di Wilker KBI Batam.....	25
Tabel 3.2	Perkembangan Suku Bunga (%)	25
Tabel 3.3	Perkembangan Indikator Perbankan di Wilker KBI Batam	26
Tabel 3.4	Perkembangan Total Asset Perbankan di Wilker KBI Batam....	27
Tabel 3.5	Penghimpunan Dana Bank Umum di wilker KBI Batam.....	29
Tabel 3.6	Perkembangan Outstanding Kredit Bank Umum di wilker KBI Batam	31
Tabel 3.7	Perkembangan Penyaluran Kredit Bank Umum	33
Tabel 3.8	Perkembangan Kolektibilitas Kredit, NIM, LDR Bank Umum....	33
Tabel 3.9	Penyebaran Kredit dan Penghimpunan Dana Bank Umum.....	34
Tabel 3.10	Perkembangan Kredit UMKM di wilker KBI Batam	35
Tabel 3.11	Perkembangan Data Keuangan BPR Wilker KBI Batam.....	37
Tabel 3.12	Perkembangan Kredit yang diberikan BPR dan Kualitasnya....	38

Tabel 3.13 Perkembangan Inflow dan Outflow Uang Kartal	40
Tabel 3.14 Jumlah Uang Palsu yang ditemukan	42
Tabel 3.15 Perputaran kliring dan cek/BG kosong	44
Tabel 4.1 Realisasi Penerimaan Pendapatan Kota Batam Periode 2005 ..	47
Tabel 4.2 Target APBD Kota Batam tahun 2004- 2005.....	48
Tabel 4.3 APBD Kabupaten Karimun tahun 2005	49
Tabel 4.4 APBD Kota Tanjung Pinang Tahun 2005	51
Tabel 4.5 RAPBD Provinsi Kepri tahun 2005	52

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 1.1 Perkembangan PDRB (Rp Juta) dan LPE triwulanan.....	6
Grafik 1.2 Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha atas Dasar Harga Berlaku.....	12
Grafik 2.1 Perkembangan Laju Inflasi Batam	20
Grafik 2.2 Perkembangan Inflasi Kota Batam, Pekanbaru dan Nasional	20
Grafik 3.1 Perkembangan total aset bank umum di wilker BI-Batam.....	28
Grafik 3.2 Perkembangan DPK Bank Umum Wilker KBI Batam.....	30
Grafik 3.3 Perkembangan Outstanding Kredit bank umum di wilker KBI Batam.....	32
Grafik 3.4 Komposisi Penyaluran Kredit.....	32
Grafik 3.5 Perkembangan LDR Bank Umum Wilker KBI Batam	36
Grafik 3.6 Perkembangan LDR Menurut Kelompok Bank	37
Grafik 3.7 Pergerakan Inflow Uang Kartal.....	40
Grafik 3.8 Pergerakan Outflow Uang Kartal.....	40
Grafik 3.9 Perkembangan inflow,PTTB & Rasio PTTB.....	41
Grafik 3.10 Perkembangan Transaksi Kliring di wilker KBI Batam Berdasarkan Nominal Warkat.....	43
Grafik 3.11 Perkembangan Transaksi Kliring di wilker KBI Batam Berdasarkan Jumlah Warkat.....	43
Grafik 3.12 Perkembangan Transaksi Kliring di wilker KBI Batam.....	44

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Tabel 1	PDRB Provinsi Kepri atas dasar harga konstan 1993.....	57
Tabel 2	Perkembangan indeks harga konsumen (IHK) kota Batam.....	58
Tabel 3	Perkembangan inflasi kota Batam, Pekanbaru dan Nasional...	59
Tabel 4	Data bank umum wilayah kerja Bank Indonesia Batam.....	60
Tabel 5	Data bank umum wilayah Batam	61
Tabel 6	Data bank umum wilayah Kepulauan Riau	62
Tabel 7	Data pengaliran kas masuk/keluar dan kegiatan PTTB KBI Batam	63
Tabel 8	Perputaran kliring Batam, Tanjung Pinang dan Tj. Balai Karimun	64

RINGKASAN EKSEKUTIF
KAJIAN PERKEMBANGAN EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TRIWULAN IV - 2005

Pada tahun 2005, pertumbuhan perekonomian Provinsi Kepulauan Riau sebesar 6,16% (Jan s.d Des'05), dimana terdapat peningkatan bila dibandingkan dengan pertumbuhan tahun 2004 yang mencapai 4,06%. Sementara itu, untuk triwulan IV-2004, pertumbuhan PDRB Provinsi Kepulauan Riau sebesar 0,81% (qtq) yang sedikit melambat bila dibandingkan triwulan III-2005 (0,95%).

Perlambatan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepri pada triwulan IV-2005 dibandingkan triwulan III-2005 sebagaimana tercermin pada melambatnya pertumbuhan ekonomi pada sektor pertambangan & penggalian, sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, hotel & restoran, serta sektor keuangan, persewaan & jasa perusahaan masing-masing dari (0,03%); 1,11%; 0,83%; 0,88% pada triwulan III-2005 menjadi (0,16%); 0,87%; 0,63%; (0,01%).

Meskipun terdapat perlambatan pada beberapa sektor perekonomian, namun struktur

perekonomian Provinsi Kepulauan Riau sampai dengan periode triwulan IV-2005 masih didominasi oleh sektor industri dengan kontribusi sebesar 53,71% sedikit meningkat perannya dibanding triwulan III-2005 yang memberikan kontribusi sebesar 53,66% yang menunjukkan bahwa sampai dengan triwulan III-2005, sektor industri masih menjadi sektor utama perekonomian Provinsi Kepulauan Riau. Dukungan Pemerintah Pusat dan Daerah pada berbagai paket kebijakan bagi pengembangan sektor industri di wilayah Kepri merupakan langkah nyata yang patut dijadikan *main frame* dalam mendorong pertumbuhan investasi. Salah satunya adalah dengan dikeluarkannya paket juli atau *Bonded Zone Plus* (BZP) untuk beberapa wilayah di Kepri. Namun, untuk menggairahkan minat investor asing dalam menanamkan modalnya di wilayah Kepri perlu didukung oleh beberapa faktor, diantaranya adalah kepastian hukum status Batam, keamanan, serta faktor sosial & politik

yang stabil dan kebijakan Pemerintah yang didukung oleh pasar. Dalam rangka penerapan *Bonded Zone Plus* (BZP) di Batam, terdapat Tempat Penimbunan Sementara (TPS) yang merupakan salah satu awal dari pembenahan sistem pemasukan dan pengeluaran barang dari Batam. Disamping itu Batam juga akan dijadikan sebagai *pilot project* pelaksanaan *national single window* pada pertengahan tahun 2006, dimana semua proses ekspor dan impor barang di kawasan Asean melalui sistem *electronic data intelligence* serta memberikan keunggulan berupa pelayanan pabean secara terpadu dengan biaya relatif rendah.

Pertumbuhan investasi di Batam pada tahun 2005 menunjukkan penurunan pada jumlah perusahaan baru yang menanamkan modalnya di Kota Batam terhadap tahun 2004, dimana pada tahun 2005 terdapat 59 perusahaan baru sedangkan tahun 2004 berjumlah 62 perusahaan baru. Namun, bila dilihat dari nilai nominal rencana investasi asing tersebut maka terdapat peningkatan, dimana pada tahun 2005 sebesar US\$242.393.611 sedangkan pada tahun 2004 sebesar US\$142.116.104. Hal ini

menunjukkan bahwa pada tahun 2005 perusahaan baru yang berencana untuk menanamkan modalnya di Kota Batam merupakan perusahaan dengan skala menengah keatas.

Beberapa faktor yang mempengaruhi minat investor untuk menanamkan modalnya di Batam, salah satunya adalah biaya tenaga kerja yang relatif rendah serta letak geografis yang strategis. Pemerintah Provinsi bersama Otorita Batam dan Pemko Batam dari waktu ke waktu terus mempromosikan bahwa kondisi di Batam lebih kondusif, salah satunya adalah melalui pertemuan-pertemuan dan seminar-seminar yang menjadi salah satu media pertemuan forum bisnis. Saat ini forum bisnis yang berlangsung secara rutin adalah forum bisnis regional yang diikuti oleh tiga negara yaitu: Singapura, Johor (Malaysia), dan Batam (Indonesia) dimana pertemuan tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 2005 bertempat di Johor, dan untuk pertemuan mendatang telah disepakati bahwa Batam akan menjadi tuan rumah pertemuan selanjutnya. Dalam pertemuan tersebut, pengusaha dari tiga wilayah memperkenalkan peluang bisnis yang ada di

daerah, disamping juga dibahas rencana untuk menjalin hubungan bisnis diantara pengusaha tiga negara. Penyelenggaranya adalah Majelis Amanah Rakyat (MARA) Johor dan juga Persatuan Pedagang dan Usahawan Malaysia.

Sebagai provinsi yang masih berusia muda sejak resmi berdiri pada 1 Juli 2004, Provinsi Kepulauan Riau sedang melakukan pembangunan dan perbaikan di segala bidang. Sejak resmi berdiri tersebut, ibukota Provinsi Kepri masih berlokasi di Kota Batam, namun mulai tahun 2006 ibukota Provinsi Kepri akan berada di Kota Tanjung Pinang dan sampai saat ini masih dalam tahap persiapan.

INFLASI

Pada triwulan I-2005, IHK Kota Batam mencapai 2,65% dan pada triwulan II-2005, IHK Kota Batam mencapai 0,39% lebih rendah dibandingkan IHK Pekanbaru (2,91%) dan Nasional (2,03%). Sementara itu pada triwulan III-2005 laju inflasi Kota Batam mencapai 1,52% dimana laju inflasi terbesar terdapat pada bulan Agustus 2005 (0,86%) sementara pada bulan September 2005 Kota Batam memiliki laju

inflasi paling rendah dibandingkan kota-kota lain di Indonesia yaitu sebesar 0,02%. Menjelang akhir tahun 2005, laju inflasi Provinsi Kepri yang diwakili oleh Kota Batam pada triwulan IV-2005 mencapai 9,72% (qtq) yang merupakan tingkat inflasi tertinggi selama beberapa tahun terakhir, meskipun masih lebih rendah dibandingkan Pekanbaru (10,59%) dan nasional (10,08%).

Laju inflasi terbesar Kota Batam pada triwulan IV-2005 terjadi pada bulan Oktober yang mencapai 7,95%, sementara pada bulan November sebesar 1,95%. Sedangkan pada bulan Desember 2005 terjadi deflasi sebesar (0,30%) yang dipengaruhi oleh penurunan indeks harga pada kelompok bahan makanan sebesar (1,74%).

Laju inflasi terbesar Kota Batam pada triwulan IV-2005 terdapat pada kelompok transport, komunikasi & jasa keuangan (23,06%), diikuti oleh kelompok bahan makanan (10,3%), kelompok makanan jadi, minuman, rokok & tembakau (5,98%), kelompok perumahan, air, listrik, gas & bahan bakar (4,38%), kelompok sandang (1,76%), dan kelompok kesehatan (1,46%). Sementara kelompok

komoditi yang mengalami laju inflasi terendah terdapat pada kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga (0,63%).

Peningkatan terbesar laju inflasi pada kelompok transport, komunikasi & jasa keuangan terjadi pada bulan Oktober 2005 yang mencapai 22,98% yaitu sebagai dampak derivatif dari kenaikan harga BBM yang juga berdampak pada peningkatan tarif angkutan umum & tarif pelni.

PERBANKAN DAN SISTEM PEMBAYARAN

Selama tahun 2005, perkembangan kinerja perbankan di wilayah kerja KBI Batam yang meliputi Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan pergerakan yang cukup baik. Hal ini terlihat pada indikator: jumlah bank, total asset, jumlah dana pihak ketiga, jumlah penyaluran kredit, tingkat LDR, serta tingkat NPLs.

Sampai dengan Desember 2005, terdapat 24 bank umum yang beroperasi di Provinsi Kepulauan Riau, terdapat peningkatan sebanyak 3 bank umum, pada tahun 2004 tercatat sebanyak 21 bank umum, sementara peningkatan yang cukup signifikan terdapat pada pertumbuhan jumlah BPR, yang mengalami penambahan jumlah

bank sebanyak 6 BPR, yaitu pada tahun 2004 tercatat sebanyak 4 BPR dan sampai dengan akhir tahun 2005 berjumlah 10 BPR.

Perkembangan **total asset** Bank Umum di wilayah KBI Batam pada akhir tahun 2005 (Nov'05) sebesar Rp.10,074 triliun dimana tumbuh 11,94% terhadap akhir tahun 2004 (ytd) dan -1,36% terhadap triwulan III-2005 (qtq). Sementara itu, **jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK)** Bank Umum sampai dengan November 2005 mencapai Rp.8,186 triliun dan tumbuh sebesar 6,02% terhadap akhir tahun 2004 (ytd) dan -2,25% terhadap triwulan III-2005 (qtq).

Pertumbuhan DPK pada tahun 2005 juga diikuti dengan pertumbuhan **penyaluran kredit** oleh Bank Umum dimana pada Nov'05 total kredit sebesar Rp.5,687 triliun yaitu tumbuh sebesar 29,33% (ytd) dan 0,04% (qtq). Peningkatan jumlah penyaluran kredit serta jumlah DPK pada akhirnya berpengaruh pada pencapaian LDR Bank Umum yang mencapai 69,49% (Nov'05) yang meningkat cukup baik dibandingkan tahun 2004 (56,96%) dan triwulan III-2005 (63,68%).

Sementara itu tingkat **NPL** gross Bank Umum pada Nov'05 mencapai 5,59%, meningkat cukup

signifikan terhadap tahun 2004 (2,67%) dan triwulan III-2005 (4,56%). Peningkatan tersebut diantaranya dipengaruhi oleh ketatnya perhitungan Kualitas Aktiva Produktif dengan prinsip *One Debitor and One Project Concept* sebagaimana diatur oleh PBI No.7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005. Selain itu, dipengaruhi pula oleh gejolak harga yang terjadi pada dekade terakhir, sehingga berdampak pada penurunan kemampuan *financial* para debitur.

Kegiatan pembayaran tunai dan non-tunai pada bidang sistem pembayaran melalui kegiatan kas, kliring dan BI-RTGS pada triwulan IV-2005 (s.d posisi Nov'05) menunjukkan peningkatan. Jumlah aliran uang masuk (***inflow***) pada triwulan IV-2005 sebesar Rp.799,035 miliar, jumlah aliran uang keluar (***outflow***) sebesar Rp.1,244 triliun. Berdasarkan hal tersebut, maka posisi kas gabungan mengalami *net outflow*

sebesar Rp.445,258 miliar. Sementara itu nilai PTTB pada triwulan IV-2005 sebesar Rp.103,815 miliar.

Kegiatan **kliring** pada triwulan IV-2005, meliputi: jumlah warkat yang dikliringkan sebesar 150.400 lembar dengan nominal transaksi mencapai Rp.2,26 triliun. Sementara itu, jumlah cek/BG kosong mencapai 1.697 lembar dengan nilai nominal mencapai Rp.32,66 miliar.

Jumlah **Pedagang Valuta Asing (PVA)** yang melakukan kegiatan usaha di wilayah kerja KBI Batam sampai dengan triwulan IV-2005 berjumlah 88 PVA dimana terdapat peningkatan sebanyak 7 PVA terhadap triwulan III-2005.

Berdasarkan data yang ada, jumlah PVA di wilayah KBI Batam termasuk cukup besar setelah DKI Jakarta dan Denpasar. Hal ini diperkirakan karena letak wilayah Kota Batam yang berada dekat dengan negara Singapura dan Malaysia.

Batam, Desember 2005

RINGKASAN EKSEKUTIF
INDIKATOR EKONOMI DAN MONETER TRIWULANAN
WILAYAH KERJA KANTOR BANK INDONESIA BATAM

INDIKATOR	2002				2003				2004				2005			
	Trw I	Trw II	Trw III	Trw IV	Trw I	Trw II	Trw III	Trw IV	Trw I	Trw II	Trw III	Trw IV	Trw I	Trw II	Trw III	Trw IV
MAKRO																
Laju Inflasi (q-t-q)	3.86	0.42	2.53	2.06	2.07	-0.95	0.75	2.35	0.47	1.10	0.70	1.89	2.65	3.05	1.52	9.72
Laju Inflasi (y-o-y)	14.78	9.70	9.75	9.14	7.26	5.79	3.95	4.27	2.64	3.69	3.89	4.22	6.48	5.73	6.60	14.79
IHK Bahan Makanan	2.38	-2.62	1.40	5.51	-1.53	-5.32	-1.03	7.35	-0.16	-0.34	0.83	3.18	3.78	0.05	2.21	10.3
IHK Makanan Jadi	7.98	-0.47	0.27	0.44	6.95	-0.27	1.09	0.79	0.14	0.45	0.89	4.99	1.52	1.12	0.69	5.98
IHK Perumahan	1.54	3.86	3.68	1.27	3.12	1.70	0.46	1.05	0.27	1.07	0.52	0.32	0.70	0.24	1.46	4.38
IHK Sandang	-0.17	-2.96	0.39	1.91	0.26	-1.15	1.45	3.36	-0.01	0.43	0.54	1.25	1.00	1.09	2.65	1.76
IHK Kesehatan	5.32	0.01	-0.19	0.12	0.62	5.68	1.82	-0.49	-0.01	1.84	-0.12	0.07	0.67	1.17	1.3	1.46
IHK Pendidikan	0.97	-1.83	13.79	0.18	0.28	-0.33	7.91	0.15	0.05	0.65	1.11	0.34	0.07	0.14	6.98	0.63
IHK Transport	11.07	3.44	1.75	1.13	2.19	-0.14	0.00	0.00	0.19	4.44	0.69	0.04	7.20	0.03	0.03	23.06
Pertumbuhan PDRB	2.03	2.11	2.24	1.54	2.14	1.41	2.06	1.99	1.86	1.11	0.73	0.36	3.17	1.23	0.95	0.81
Ekspor (Ribuan USD)	935,137	1,086,885	1,351,867	987,891	1,110,161	1,000,002	1,229,359	1,248,603	1,077,826	925,490	1,259,378	762,606	940,773	1,618,970	1,282,820	1,307,957
Impor (Ribuan USD)	70,077	62,611	37,747	73,497	465,893	35,799	16,862	34,098	99,729	125,456	10,980	212,948	91,954	260,646	332,178	354,964
PERBANKAN																
Deposito (miliar Rp)	1,443.03	1,383.78	1,530.85	1,400.07	1,452.45	1,329.15	1,438.21	1,439.15	1,328.99	1,270.24	1,408.87	1,446.24	1,616.15	1,805.53	2,070.99	2,169.29
Giro (miliar Rp)	1,931.32	2,063.34	2,194.91	2,169.70	1,996.06	2,181.32	2,328.63	2,404.28	2,397.72	2,745.92	2,860.73	2,839.40	3,106.07	3,183.28	3,262.74	3,524.56
Tabungan (miliar Rp)	1,712.89	1,781.65	1,834.46	2,046.62	1,959.85	2,041.54	2,190.14	2,542.28	2,536.22	2,742.02	2,900.97	3,016.97	3,084.28	3,132.15	3,040.04	3,013.30
DPK (miliar Rp)	5,087.24	5,228.77	5,560.22	5,616.39	5,408.36	5,552.01	5,956.98	6,395.71	6,262.93	6,758.18	7,170.59	7,302.61	7,806.50	8,120.96	8,373.78	8,707.15
Total Asset (miliar Rp)	5,557.96	5,781.89	6,140.12	6,381.89	6,165.65	6,330.12	6,667.26	7,310.10	7,152.30	7,787.04	8,263.39	8,440.49	9,316.23	9,715.10	10,213.91	10,666.45
Kredit Umum (miliar Rp)	1,471.79	1,604.55	1,781.06	2,019.03	2,159.81	2,450.28	2,714.74	2,302.09	2,413.38	3,564.40	3,962.75	4,141.66	4,761.13	5,104.37	5,685.47	5,877.40
KUK (miliar Rp)	721.09	745.71	760.09	799.83	828.15	880.12	781.42	744.99	765.80	776.10	780.06	778.51	794.30	787.40	757.98	1394.67
Suku Bunga Kredit (rata2 tertimbang)	19.61%	20.68%	19.75%	18.10%	17.99%	17.48%	16.78%	15.45%	15.13%	15.39%	15.60%	15.26%	16.69%	21.61%	13.84%	16.31%
Suku Bunga Dep 3 bln (rata2 tertmbng)	13.80%	13.53%	12.87%	11.96%	11.51%	10.52%	9.10%	8.13%	7.23%	6.46%	6.37%	6.26%	6.50%	6.78%	6.94%	9.89%
LDR (%)	28.93%	30.69%	32.03%	35.95%	39.93%	44.13%	45.57%	47.72%	50.76%	52.74%	55.26%	56.71%	60.99%	62.85%	67.90%	67.50%
NIM (%)	-2.50%	-4.45%	-6.32%	-5.97%	-0.16%	0.05%	1.00%	2.45%	1.42%	2.83%	3.99%	4.84%	1.47%	2.76%	3.77%	4.83%
NPL (%)	4.29%	4.77%	4.30%	2.70%	3.03%	5.09%	3.42%	2.37%	3.68%	4.10%	3.94%	3.34%	2.72%	4.12%	5.15%	6.01%
SISTEM PEMBAYARAN																
Inflow (miliar Rp)	254.46	206.08	254.75	318.34	480.66	348.81	361.07	434.73	482.27	411.59	484.41	538.76	640.23	544.74	499.38	789.7
Outflow (miliar Rp)	512.72	586.71	597.84	852.72	475.31	546.27	639.65	1,033.53	581.28	891.15	838.26	1,339.74	926.99	999.53	1,013.85	1,234.96
PTTB (miliar Rp)	134.20	104.61	110.16	103.9	316.26	180.58	177.3	177.04	260.29	312.12	413.45	308.78	409.23	252.3	133.24	103.82
Nominal Uang Palsu	1,220,000	400,000	580,000	50,000	400,000	320,000	1,680,000	560,000	775,000	1,170,000	830,000	2,390,000	3,400,000	1,810,000	985,000	1,305,000
Jumlah uang palsu (lembar)	26	10	12	1	9	7	34	11	13	15	12	43	62	32	14	18
Volume Kliring (lembar)	114,564	124,392	132,744	126,663	124,504	131,251	138,377	135,819	136,461	140,276	145,620	145,176	144,005	154,879	157,535	150,400
Nominal Kliring (miliar Rp)	3,087.91	3,517.37	3,499.07	1,878.32	1,783.88	1,629,237	1,843,390	1,908,215	1,888,256	1,914,133	2,062,812	2,151,372	2,054,496	2,208,473	2,371,965	2,258,818
KEUANGAN DAERAH																
Pendapatan Asli Daerah (miliar Rp)	8.40	13.46	12.31	14.35	14.59	13.52	14.01	8.29	11.43	12.62	13.85	17.82	14.46	29.03	0	0
Dana Alokasi Umum (miliar Rp)	26.06	26.04	26.05	26.29	27.00	16.11	21.74	56.59	26.05	26.05	26.05	17.37	20.97	12.76	0	0
Dana Alokasi Khusus (miliar Rp)	0	0	0	0.69	0	0	0.99	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Data Ekspor & Impor, sumber PDIE Jakarta

Ket: *) Data diperbaiki

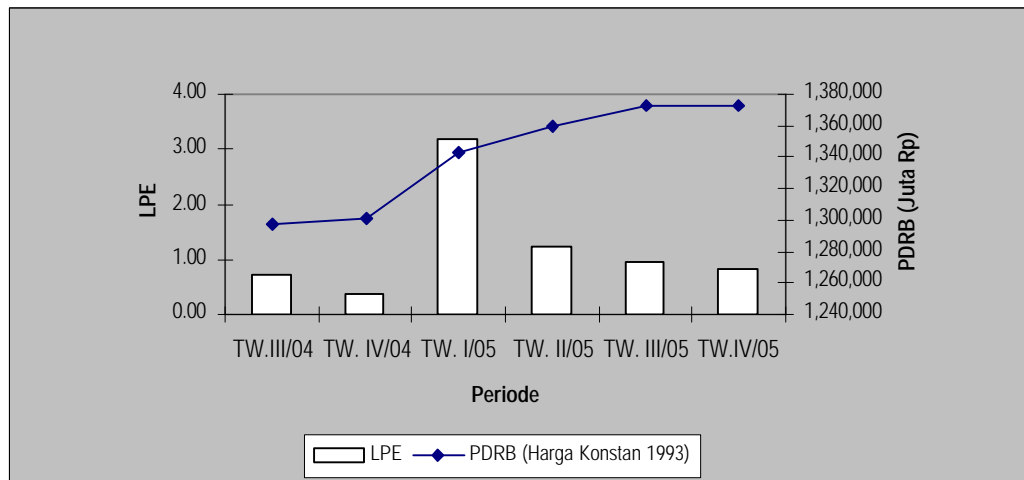
Bab 1
Perkembangan Ekonomi Makro
Provinsi Kepulauan Riau

1. KONDISI UMUM

Pertumbuhan perekonomian Provinsi Kepulauan Riau tahun 2005 adalah sebesar 6,16%, mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan pertumbuhan tahun 2004 yang tercatat sebesar 4,06%. Selama periode Triwulan IV tahun 2005 pertumbuhan ekonomi provinsi diperkirakan sebesar 0,81%, lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Triwulan III tahun 2005 sebesar 0,95%.

Melambatnya pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau pada Triwulan IV tahun 2005 dibandingkan dengan triwulan-triwulan sebelumnya tercermin pada melambatnya pertumbuhan pada sektor pertambangan & penggalian, sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, hotel & restoran, serta sektor keuangan, persewaan & jasa perusahaan masing-masing dari (0,03%); 1,11%; 0,83%; 0,88% pada Triwulan III tahun 2005 menjadi (0,16%); 0,87%; 0,63% dan (0,01%) pada Triwulan IV tahun 2005.

Grafik 1.1 Perkembangan PDRB (Rp Juta) dan LPE Triwulanan



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) - Kota Batam

Berdasarkan grafik 1.1, perkembangan PDRB Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan harga konstan terus mengalami pertumbuhan sedangkan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO PROVINSI KEPRI

berfluktuasi dengan kecenderungan menurun. Pertumbuhan perekonomian daerah yang secara triwulanan mengalami perlambatan antara lain dipengaruhi adanya penurunan kegiatan konsumsi dan investasi sehubungan dengan melemahnya daya beli masyarakat akibat kenaikan Bahan Bakar Minyak dan tingginya tingkat suku bunga.

2. SISI PERMINTAAN

Dari sisi permintaan, komponen ekspor mengalami pertumbuhan terbesar pada Triwulan IV-2005 yang mencapai 1,97% (q-t-q), diikuti oleh komponen pembentukan modal tetap bruto sebesar 1,91% (q-t-q). Pertumbuhan kedua komponen tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan pada Triwulan III-2005. Sementara itu komponen lainnya mengalami pertumbuhan pada Triwulan IV-2005, namun lebih kecil apabila dibandingkan dengan Triwulan III-2005.

Data perkembangan PDRB Provinsi Kepri berdasarkan penggunaan terdapat pada tabel 1.1

Tabel 1.1
Pertumbuhan PDRB Provinsi Kepri Menurut Penggunaan
dalam persen (%)

Komponen	2004	2005			
	Tw. IV	Tw. I	Tw. II	Tw. III	Tw. IV
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga	1,47	0,89	1,83	1,50	1,18
2. Pengeluaran Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	1,68	1,80	1,78	1,36	0,95
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1,23	5,44	0,79	0,47	0,14
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	1,17	1,70	1,50	1,20	1,91
5. Perubahan Stok	-	-	-	-	-
6. Ekspor	1,09	1,29	1,72	1,34	1,97
7. Impor	1,15	0,47	2,22	1,76	1,01
PDRB	0,36	3,17	1,23	0,95	0,81

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) - Kota Batam

Distribusi persentase terbesar terhadap pembentukan nilai PDRB Provinsi Kepulauan Riau terdapat pada komponen ekspor sebesar 102,90%, diikuti oleh komponen impor sebesar 72,23%, serta komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga sebesar 45,12%. Angka ini dapat dilihat pada tabel 1.2

PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO PROVINSI KEPRI

Tabel 1.2
Distribusi Persentase PDRB Provinsi Kepulauan Riau Menurut Penggunaan

dalam persen (%)

KOMPONEN	2004		2005			
	Tw. III	Tw. IV	Tw. I*)	Tw. II	Tw. III	Tw. IV
1. Pengeluaran Konsumsi RT	46,42	47,12	45,32	45,39	45,30	45,12
2. Pengeluaran Konsumsi	0,39	0,39	0,39	0,39	0,38	0,38
Lembg Non Profit	4,68	4,74	4,79	4,76	4,70	4,64
3. Pengeluaran Konsumsi	36,59	37,18	35,82	35,79	35,66	35,64
Pemerintah	(20,38)	(21,97)	(16,57)	(16,80)	(16,64)	(16,28)
4. Pertumbuhan Modal Tetap	105,54	106,79	102,64	103,03	103,07	102,90
Bruto	73,23	74,26	72,39	72,56	72,47	72,23
5. Perubahan Stok						
6. Ekspor						
7. Impor						
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik - Kota Batam

*) Angka diperbaiki

Nilai ekspor non migas Kota Batam pada Triwulan III-2005 mencapai US\$ 1,36 miliar dimana nilai ekspor terbesar terdapat pada kelompok komponen barang modal dan aksesoris (US\$ 570 juta) dengan volume ekspor sebesar 16 juta kg. Sementara itu nilai impor non migas Kota Batam pada triwulan yang sama mencapai US\$ 244,21 juta dimana nilai impor terbesar terdapat pada kelompok persediaan industri (*processed*) sebesar US\$ 163,32 juta dengan volume impor sebesar 233 juta kg.

Laju pertumbuhan PDRB Provinsi Kepulauan Riau dari sisi penggunaan periode 2004 sampai dengan triwulan III-2005 atas dasar harga konstan 1993 ditayangkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1.3
PDRB Provinsi Kepulauan Riau Menurut Penggunaan Atas Dasar Harga Konstan 1993

(dalam Juta Rupiah)

KOMPONEN	2004		2005			
	Tw. III	Tw. IV	Tw. I	Tw. II	Tw. III	Tw. IV
1. Pengeluaran Konsumsi	615.853,22	624.910,28	630.494,01	642.034,29	651.656,27	
RT	279.291,26	283.370,58	283.910,42	289.333,99	293.915,16	
a. Makanan	336.561,96	341.539,70	346.583,59	352.700,30	357.741,11	
b. Bukan Makanan	4.770,52	4.850,43	4.937,73	5.025,82	5.094,11	
2. Pengeluaran Konsumsi						
Lembg Non-Profit	74.871,12	75.793,10	79.913,01	80.548,08	80.924,25	
3. Pengeluaran Konsumsi						
Pemerintah	354.016,36	358.157,82	364.229,51	369.692,19	374.127,51	
4. PMTB	(423.668,6	(440.178,3	(428.550,8	(438.556,35	(446.797,8	

PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO PROVINSI KEPRI

KOMPONEN	2004		2005			
	Tw. III	Tw. IV	Tw. I	Tw. II	Tw. III	Tw. IV
5. Perubahan Stok	1)	9)	0))	2)	
6. Ekspor	1.282.923,8	1.296.940,2	1.313.623,7	1.336.254,1	1.354.133,	
7. Impor (-)	2	3	3	2	84	
	611.914,24	618.924,61	621.804,08	635.598,02	646.759,75	
PDRB	1.296.852,1	1.301.548,8	1.342.843,1	1.359.400,1	1.372.378,	
	9	6	1	4	41	

Sumber : Badan Pusat Statistik - Kota Batam

Sementara tabel 1.4 menggambarkan tingkat PDRB Provinsi Kepulauan Riau menurut penggunaan berdasarkan harga berlaku

Tabel 1.4
PDRB Provinsi Kepulauan Riau Menurut Penggunaan Atas
Dasar Harga Berlaku

(dalam Juta Rupiah)

KOMPONEN	2004		2005			
	Tw. III	Tw. IV	Tw. I	Tw. II	Tw. III	Tw. IV
1. Pengeluarn kons RT	1.736.654,27	1.772.880,30	1.790.041,36	1.830.985,10	1.861.821,44	
a. Makanan	848.703,43	866.352,04	870.135,52	891.006,76	906.817,69	
b. Bukan Makanan	887.950,84	906.528,26	919.905,84	939.978,34	955.003,74	
	14.421,26	14.772,53	15.447,60	15.660,13	15.762,83	
2. Pengeluarn kons lembg swasta nirlaba	175.138,85	178.332,47	189.284,59	191.844,53	193.273,40	
	1.368.745,	1.399.058,	1.414.878,	1.443.776,	1.465.701,	
3. Pengeluaran kons pem	97	78	41	04	13	
	(762.489,8	(826.456,3	(654.431,3	(677.552,5	(684.132,4	
4. PMTB	6)	0)	5)	9)	8)	
5. Perubahan stok	3.948.429,	4.017.999,	4.054.342,	4.156.172,	4.235.920,	
6. Ekspor	78	57	24	13	08	
7. Impor	2.739.654,	2.794.002,	2.859.566,	2.926.977,	2.978.336,	
	36	80	21	71	32	
PDRB	3.741.245,	3.762.584,	3.949.996,	4.033.907,	4.109.810,	
	91	55	63	64	07	

Sumber : Badan Pusat Statistik - Kota Batam

3. SISI PENAWARAN

Perlambatan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau pada Triwulan IV-2005 antara lain dipengaruhi oleh melambatnya investasi dan menurunnya persepsi bisnis.

Dari sisi penawaran, komponen pertambangan pada triwulan IV-2005 mengalami pertumbuhan negatif terhadap triwulan sebelumnya sebesar

-0,16%. Penurunan ini cukup memberikan dampak pada tingkat PDRB Provinsi Kepri pada triwulan laporan.

Laju pertumbuhan sektoral PDRB Provinsi Kepulauan Riau menurut lapangan usaha dapat dilihat pada tabel 1.5, sementara nilai PDRB Provinsi Kepulauan Riau atas dasar

PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO PROVINSI KEPRI

harga konstan 1993 terdapat pada tabel 1.6 808,151 triliun), perdagangan, hotel, restoran (Rp190,446 triliun), diikuti Tingkat PDRB Provinsi Kepulauan Riau pada triwulan IV-2005 (Tabel 1.6) sebesar Rp 1.383.454,48 juta dimana jumlah terbesar terdapat pada komponen industri (Rp 73,994 triliun)

Tabel 1.5
Pertumbuhan PDRB Provinsi Kepri
Menurut Lapangan Usaha

dalam persen (%)

Lapangan Usaha	2004	2005				
	Tw. IV	Tw. I	Tw. II	Tw. III	Tw. IV	
1. Pertanian	0,37	3,06	0,58	1,10	1,48	
2. Pertambangan	0,25	1,94	1,36	(0,03)	(0,16)	
3. Industri	0,38	3,87	1,36	(0,30)	0,87	
4. Listrik, gas, air	0,35	0,98	1,51	0,58	0,68	
5. Bangunan	0,31	1,88	0,31	0,71	1,21	
6. Perdag,Htl,Re	0,37	2,77	0,87	0,83	0,63	
7. Pengkt	0,34	2,23	1,21	0,99	1,04	
komunks	0,39	1,34	1,27	0,88	0,01	
8. Keuangan	0,29	1,54	2,30	0,11	0,89	
9. Jasa						
PDRB	0,36	3,17	1,23	0,95	0,81	

Sumber : BPS - Kota Batam

Tabel 1.6
PDRB Provinsi Kepulauan Riau Atas Dasar Harga Konstan
1993
Menurut Lapangan Usaha

dalam juta rupiah

Lap. Usaha	2004		2005			
	Tw. III	Tw. IV	Tw. I	Tw. II	Tw. III	Tw. IV
1. Pertanian	60.884,65	61.110,55	62.979,85	63.345,29	64.045,68	64.987,9
2. Pertambangan	42.008,24	42.114,75	42.931,85	43.514,09	43.500,17	43.432,2
3. Industri	749.824,40	752.639,40	781.736,51	792.377,01	801.182,11	808.151,7
4. Listrik, gas, air	18.417,77	18.481,45	18.661,92	18.943,06	19.052,92	60.718,4
5. Pangunan	58.109,27	58.290,17	59.385,70	59.570,22	59.992,43	190.446,2
6. Perdag,htl,res	180.405,70	181.064,54	186.078,01	187.695,94	189.255,51	71.959,3
7. Pengkt.& Komunikasi	67.936,44	68.168,17	69.685,29	70.526,20	71.221,49	73.994,0
8. Keuangan	71.193,99	71.468,24	72.429,24	73.349,34	73.998,12	50.581,8
9. Jasa	48.071,69	48.211,59	48.954,71	50.078,98	50.135,92	23.884,6
PDRB	1.296.852,1	1.301.548,8	1.342.843,1	1.359.400,1	1.372.378,4	1.383.454,48

Sumber : Badan Pusat Statistik - Kota Batam

Sementara itu, tingkat PDRB Provinsi Kepulauan Riau menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku dapat dilihat pada tabel 1.7. Komponen industri pengolahan masih menjadi komponen terbesar yang mencapai Rp 2,241 triliun.

PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO PROVINSI KEPRI

Tabel 1.7
PDRB Provinsi Kepri Menurut Lapangan Usaha
atas dasar harga berlaku

(dalam juta rupiah)

Lapangan Usaha	2004		2005			
	Tw. III	Tw. IV	Tw. I	Tw. II	Tw. III	Tw. IV
1. Pertanian	247.761,20	248.992,86	264.682,30	271.627,86	277.817,66	283.117,68
2. Pertambgn&Penggalian	233.947,42	235.104,36	245.380,97	247.406,76	252.386,21	257.450,75
3. Industri Pengolahan	2.001.696,67	2.014.048,08	2.113.638,93	2.162.712,04	2.205.546,06	2.240.826,77
4. Listrik,Gas&Air Bersih	42.732,40	42.911,90	45.275,48	45.569,13	45.861,48	46.521,14
5. Bangunan	171.136,71	172.054,32	175.948,01	180.110,37	183.756,65	186.886,86
6. Perdagangan,Htl&Restoran	559.537,59	562.390,63	594.931,37	607.402,98	618.134,23	626.566,15
7. Pengangk&komnks	178.287,98	179.188,70	187.785,74	191.578,51	195.564,73	196.836,10
8. Keu,Persewaan&Jasa Pr	170.945,10	172.089,61	178.228,51	180.851,27	182.707,51	184.254,42
9. Jasa-jasa	135.200,86	135.804,06	144.125,28	146.648,74	148.035,55	150.005,09
PDRB	3.741.245,93	3.762.584,52	3.949.996,63	4.033.907,64	4.109.810,07	4.172.464,96

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Batam

Komponen industri pengolahan merupakan komponen penyumbang terbesar terhadap pembentukan tingkat PDRB Provinsi Kepulauan Riau selama ini. Pada triwulan IV-2005, komponen tersebut memberikan sumbangan sebesar 53,71% pada tingkat PDRB Provinsi Kepulauan Riau dan mengalami peningkatan sebesar 0,05% dibandingkan triwulan III-2005. Nilai ini dapat dilihat pada tabel 1.8.

Tabel 1.8
Distribusi PDRB Provinsi Kepulauan Riau Menurut
Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku

(dalam persen)

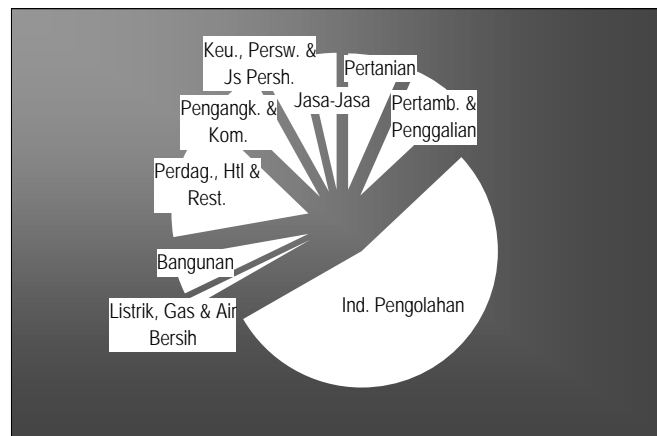
KOMPONEN	2004		2005			
	Tw. III	Tw. IV	Tw. I	Tw. II	Tw. III	Tw. IV
1. Pertanian	6,62	6,62	6,70	6,73	6,76	6,79
2. Pertamb&Penggalian	6,25	6,25	6,21	6,13	6,14	6,17
3. Industri Pengolahan	53,50	53,53	53,51	53,61	53,66	53,71
4. Listrik,Gas&Air bersh	14,96	14,95	15,06	15,06	15,04	15,02
5. Bangunan	4,77	4,76	4,75	4,75	4,76	4,72
6. Perdag,Htl&Resort	4,57	4,57	4,51	4,48	4,45	4,42
7. Pengangk&Komunik	3,61	3,61	3,65	3,64	3,60	3,60
8. Keu,Persewn&JsaKeu						
9. Jasa-jasa						
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Batam

Komponen industri pengolahan menjadi penyumbang terbesar terhadap pembentukan tingkat PDRB Provinsi Kepulauan Riau (53,71%) dimana 53,32% kontribusi diberikan oleh industri

besar/sedang, diikuti oleh komponen perdagangan, hotel & restoran (15,02%) dimana kontribusi terbesar diberikan oleh komponen perdagangan besar dan eceran sebesar 12,34%, serta komponen pertanian (6,79%). Angka ini dapat dilihat pada grafik 1.2.

Grafik 1.2
Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku
Triwulan IV-2005



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Batam

4. KETENAGAKERJAAN

Berdasarkan data yang tercatat pada Disnaker Kota Batam sampai dengan bulan November 2005, terdapat sebanyak 228.883 tenaga kerja dimana terdapat peningkatan sebesar 2,06% dibandingkan posisi Desember 2004. Secara umum, peningkatan jumlah tenaga kerja mengindikasikan bahwa daya serap lapangan usaha diluar sektor pertanian, pertambangan, listrik, gas & air bersih terhadap penyediaan lapangan kerja masih terbuka. Sektor pengangkutan & komunikasi mengalami pertumbuhan jumlah tenaga kerja terbesar pada triwulan laporan yang mencapai 102,84% atau sebanyak 1.520 orang. Fakta dimaksud menggambarkan bahwa kebijakan Pemerintah Pusat dan daerah dalam hal meningkatkan jumlah investasi di pulau Batam perlu ditingkatkan sehingga dapat berdampak pada penciptaan lapangan kerja baru.

Perkembangan jumlah tenaga kerja Kota Batam posisi November 2005 dapat dilihat pada tabel 1.9

Tabel 1.9
Perkembangan Jumlah Tenaga Kerja Kota Batam

Sektor	Des 2004	November 2005						
		WNI			WNA			WNI + WNA
		L	P	L+P	L	P	L+P	
a. Pertanian	2.017	1.818	192	2.010	-	-	-	2.010
b. Pertambangan & Penggalan	751	489	241	730	12	-	12	742
c. Industri	175.82	55.220	119.62	174.84	2.71	14	2.85	177.69
d. Listrik, Gas & Air Bersih	5	1.035	0	0	0	1	1	1
e. Bangunan	1.232	18.129	186	1.221	4	-	4	1.225
f. Perdag, Hotel & Rest	18.714	11.936	1.310	19.239	4	-	4	19.443
g. Pengangk & Komnks	15.998	1.495	4.264	16.200	39	-	39	16.239
h. Keu, Jasa Persewaan & Pershan	1.478	1.927	1.474	2.969	29	-	29	2.998
i. Jasa-jasa	2.518	5.125	609	2.536	-	-	-	2.536
	5.527		845	5.970	24	5	29	5.999
	224.26	96.174	128.74	225.91	2.82	14	2.96	228.88
	0		1	5	2	7	8	3

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Batam

5. PENANAMAN MODAL

Pengembangan kota Batam sejak awal diarahkan kepada sektor perindustrian. Hal ini dilatarbelakangi oleh letak geografis kota Batam yang sangat strategis serta potensi kota Batam kedepannya. Perkembangan rencana investasi asing (PMA) di Batam sampai dengan posisi Desember 2005 dapat dilihat pada tabel 1.10

Tabel 1.10
Perkembangan Rencana Investasi Asing (PMA) di Batam *)

Periode	2004		2005	
	Jml Perusahaan Baru	Nilai (US\$ *)	Jml Perusahaan Baru	Nilai (US\$ *)
1. Triwulan I	17	40.609.930	21	52.692.778
2. Triwulan II	15	27.931.280	8	30.304.149
3. Triwulan III	20	540.044.894	16	149.389.952
4. Triwulan IV	10	19.530.000	14	10.006.732
Jumlah	62	142.116.104	59	242.393.611

Sumber : Badan Otorita Batam

*)Termasuk perluasan usaha

Jumlah penanaman modal asing di Kota Batam selama tahun 2005 berjumlah 59 perusahaan dengan nilai investasi sebesar US\$ 242.394 juta (termasuk perluasan usaha). Jika dibandingkan dengan periode yang sama untuk tahun 2004 terdapat peningkatan sebesar 70,56% untuk nilai investasi (termasuk perluasan usaha) meskipun jumlah perusahaan baru mengalami penurunan sebanyak 3 perusahaan.

Wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang didalamnya termasuk Kota Batam memiliki karakteristik utama dibandingkan Provinsi lain di Indonesia, salah satunya adalah perkembangan daerah yang diarahkan pada sektor industri. Hal ini antara lain didukung oleh letak wilayah daerah yang strategis karena berada dekat dengan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia yang merupakan negara yang memiliki perkembangan perekonomian yang cukup pesat. Oleh karena itu, salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat untuk mendukung peningkatan kegiatan perdagangan dan industri di wilayah Provinsi Kepulauan Riau adalah dengan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan No.60/PMK.04/2005 tanggal 21 Juli 2005 tentang Tempat Penimbunan Berikat di Pulau Batam, Bintan dan Karimun (uraian lengkapnya terdapat di laporan Perkembangan Ekonomi dan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Triwulan II-2005 hal 20).

Dengan beberapa fasilitas dan kemudahan yang ditawarkan dengan adanya Peraturan Menteri Keuangan tersebut, diantaranya adalah : 1) Kemudahan di bidang perizinan pendirian kawasan berikat, 2) Kemudahan prosedur kepabeanan, 3) Fasilitas perpajakan dan kepabeanan, 4) Fasilitas perdagangan, maka diharapkan dapat menarik investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia khususnya di wilayah Batam, Bintan dan Karimun.

Namun bila kita bercermin pada data-data perkembangan jumlah investasi asing yang masuk ke wilayah Kota Batam maka terlihat bahwa jumlah perusahaan baru yang berdiri cenderung mengalami penurunan bila dibandingkan tahun lalu. Oleh karena itu perlu dikaji lebih lanjut mengenai efektivitas pemberlakuan *Bonded Zone Plus* tersebut apakah sistem tersebut sudah tepat diterapkan di wilayah Batam atau terdapat sistem lain yang lebih efektif untuk menarik investor asing sesuai dengan kebutuhan dan minat calon investor.

Untuk perkembangan investasi dalam bentuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) berdasarkan data dari Otorita Batam selama periode tahun 2004 hanya terdapat 1 perusahaan dengan nilai investasi sebesar Rp 2 milyar pada bulan November 2004 dan selama periode Januari s.d September 2005 hanya terdapat 1

perusahaan dalam bentuk PMDN yang berencana melakukan investasi dan telah mendapat persetujuan pemerintah melalui Otorita Batam dengan nilai investasi sebesar Rp. 35 miliar. Rendahnya tingkat PMDN yang tercatat di Otorita Batam merupakan satu hal yang perlu diperhatikan bagi Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah karena keunggulan Kota Batam (salah satunya adalah letak geografis Kota Batam yang sangat strategis) menjadi salah satu faktor penunjang bagi sektor ekonomi yang jika dikembangkan dengan baik akan mampu memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional.

6. PARIWISATA

Jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Batam pada triwulan IV-2005 (sampai dengan November 2005) mencapai 138.332 orang dan mengalami penurunan dibandingkan triwulan IV-2004 yang tercatat sebanyak 382.089 orang. Kecenderungan penurunan jumlah wisatawan mancanegara ke Kota Batam selama tahun 2005 ini patut menjadi perhatian khususnya bagi Pemerintah Daerah, dimana sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang dapat dimanfaatkan untuk mengoptimalkan nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Oleh karena itu, perlu dilakukan berbagai macam upaya untuk menggali sektor-sektor pariwisata di wilayah Provinsi Kepulauan Riau mengingat terdapat beberapa keunggulan yang dimiliki daerah antara lain: letak wilayah yang strategis dan berdekatan dengan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia, kebudayaan-kebudayaan daerah yang ada dan perlu dilestarikan, kekayaan dan keindahan alam yang bila dikelola secara optimal maka diharapkan mampu menarik minat wisatawan mancanegara untuk berkunjung ke Provinsi Kepulauan Riau. Disamping itu, dikenalnya Kota Batam dan wilayah sekitarnya sebagai daerah yang memiliki kawasan golf dengan kualitas internasional juga menjadi salah satu faktor pendukung disamping fasilitas dan regulasi yang berlaku.

Salah satu kelemahan dalam meningkatkan sektor pariwisata di Provinsi Kepulauan Riau saat ini adalah kurangnya informasi dan promosi yang dilakukan sehingga tidak banyak masyarakat internasional maupun nasional mengetahui tentang keunggulan

PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO PROVINSI KEPRI

daerah. Untuk itu perlu ditingkatkan hubungan kerjasama dengan berbagai pihak baik di dalam negeri maupun luar negeri untuk dapat mempromosikan dan menyebarluaskan informasi daerah. Dengan berkembangnya sektor pariwisata yang didukung oleh peningkatan kunjungan wisatawan ke wilayah Provinsi Kepulauan Riau maka akan mempengaruhi perekonomian daerah serta diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Perkembangan jumlah wisatawan mancanegara ke pulau Batam dapat dilihat pada tabel 1.11

Tabel 1.11 Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Kota Batam

(orang)

Periode	2002	2003	2004	2005
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Januari	87.048	96.518	126.168	124.169
2. Februari	86.266	103.614	123.263	83.677
3. Maret	100.041	96.256	134.119	83.811 *)
TRIWULAN I	273.355	296.388	383.550	291.657 *)
1. April	87.646	64.421	90.409	79.967
2. Mei	92.937	82.868	122.141	90.924
3. Juni	92.606	101.245	142.557	90.828
TRIWULAN II	273.189	248.534	355.107	261.719
1. Juli	86.954	113.099	134.233	87.022
2. Agustus	100.046	123.474	142.490	77.993
3. September	87.401	117.123	129.662	76.547
TRIWULAN III	274.401	353.696	406.385	261.562
1. Oktober	87.226	127.552	126.868	69.793
2. November	91.631	121.684	106.377	68.539
3. Desember	101.246	135.942	148.844	NA
TRIWULAN IV	280.103	385.178	382.089	138.332
JUMLAH	1.101.048	1.284.563	1.527.131	933.665

Sumber : BPS Kota Batam (data olahan dari Kantor Imigrasi-Batam)

*) Angka Perbaikan

Wisatawan asal Singapura masih menduduki posisi terbesar yang mengunjungi pulau Batam, diikuti oleh wisatawan asal Malaysia, dan Korea Selatan. Hal ini disebabkan karena letak geografis negara Singapura dan Malaysia yang relatif dekat dengan Batam.

Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke pulau Batam berdasarkan asal negara dapat dilihat pada tabel 1.12

Tabel 1.12 Perkembangan Negara Asal Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Batam

Kebangsaan	2004			2005			
	Tw. II	Tw. III	Tw. IV	Tw. I	Tw. II	Tw. III	Tw. IV *)
1. Singapura	267.939	314.588	297.227	218.876	185.067	162.260	90.985
2. Malaysia	38.690	44.033	40.793	33.721	31.403	31.362	18.513
3. Korea	18.602	17.815	16.093	11.429	17.060	18.028	8.763
Selatan	6.836	7.158	5.797	5.688	6.564	6.900	4.251

PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO PROVINSI KEPRI

Kebangsaan	2004			2005			
	Tw. II	Tw. III	Tw. IV	Tw. I	Tw. II	Tw. III	Tw. IV)
4. Jepang	2.629	2.909	2.593	2.630	2.358	2.400	1.510
5. Inggris	1.898	1.906	1.618	1.891	2.031	1.765	1.192
6. Amerika Serikat	1.607	1.775	1.823	1.400	1.792	2.575	1.002
7. Taiwan	1.750	1.627	953	1.752	1.701	1.432	994
8. Australia	574	637	721	1.027	570	624	445
9. Jerman	436	467	425	374	381	316	307
10. Belanda	14.147	10.756	14.073	12.869	12.221	13.880	10.370
11. Lainnya							
Jumlah	355.108	405.646	382.089	291.657	261.148	261.562	138.332

Sumber : Dinas Pariwisata Batam

*) s/d November 2005

7. PEDAGANG VALUTA ASING (PVA) BUKAN BANK

Sampai dengan triwulan IV-2005 terdapat 87 PVA yang melakukan kegiatan operasional di wilayah kerja Kantor Bank Indonesia Batam, yaitu di: Kota Batam sebanyak 61 PVA, Kota Tanjung Pinang sebanyak 12 PVA, Kab. Tanjung Balai Karimun sebanyak 9 PVA, Tanjung Uban sebanyak 3 PVA, dan Tanjung Batu sebanyak 2 PVA. Jumlah PVA di wilayah kerja KBI Batam merupakan jumlah ketiga terbesar di Indonesia setelah Jakarta dan Denpasar. Banyaknya PVA bukan bank dimungkinkan karena kemudahan perizinan, banyaknya wisatawan, letak geografis Kota Batam yang dekat dengan wilayah negara lain yaitu Singapura, Malaysia, Thailand, serta banyaknya PMA yang beroperasi.

Perkembangan jumlah transaksi jual beli valuta asing pada triwulan IV-2005 rata-rata mengalami peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya yaitu, untuk transaksi pembelian valuta SGD meningkat 26,44% dari SGD 22.938.870,05 menjadi SGD 29.003.540,76; dan valuta MYR meningkat 20,04% dari MYR 4.304.230,40 menjadi MYR 5.165.856,13; sedangkan valuta USD menurun 9,71% dari USD 1.493.283,99 menjadi 1.348.258,67. Sementara itu, untuk transaksi penjualan mengalami peningkatan pada ketiga jenis mata uang dimana valuta USD meningkat 0,94% dari US\$ 1.461.306,17 menjadi US\$ 1.475.078,58, valuta SGD meningkat 26,19% dari SGD 23.937.202,35 menjadi SGD 30.205.936,94, valuta MYR meningkat 19,81% dari MYR 5.809.531,86 menjadi RM 6.960.551,41.

Volume transaksi Uang Kertas Asing (UKA) pada Triwulan IV-2005 mengalami peningkatan dibandingkan triwulan III-2005,

berdasarkan data *positioning* UKA dengan membandingkan posisi jual dan posisi beli pada periode laporan, USD masing-masing mengalami posisi jual (*short*) masing-masing sebesar USD 126.819,91; SGD 1.202.396,18 dan MYR 1.794.695,28. Indikator tersebut mengindikasikan bahwa permintaan masyarakat akan UKA tersebut disebabkan oleh kebutuhan baik untuk transaksi ekonomi maupun biaya perjalanan ke negara dimaksud.

8. PENDUDUK

Jumlah penduduk Kota Batam sampai dengan bulan Desember 2005 tercatat sebanyak 681.586 orang dimana terdapat peningkatan sebesar 15,28% terhadap Desember 2004 yang tercatat sebanyak 591.253 orang. Jumlah penduduk pada Triwulan IV-2005 terdiri dari 330.333 orang laki-laki dan 351.253 orang perempuan.

Penyebaran penduduk di Kota Batam terkonsentrasi pada wilayah kecamatan Sei Beduk (178.912 orang), kecamatan Sekupang (142.895 orang), dan kecamatan Batu Ampar (128.228 orang), dimana persentase ketiga kecamatan tersebut masing-masing adalah sebesar 26,09%; 20,84%; dan 18,70%.

Untuk penyebaran penduduk di Kota Batam dapat dilihat pada tabel 1.13

Tabel 1.13
Penyebaran Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kota Batam di Kota Batam Periode Desember 2005

Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	%
1. Belakang Padang	10.020	9.780	19.800	2,89
2. Bulang	4.540	4.226	8.766	1,28
3. Galang	7.089	6.399	13.488	1,97
4. Sei Beduk	79.582	99.330	178.912	26,09
5. Nongsa	60.058	58.758	119.816	17,47
6. Sekupang	73.305	73.305	142.895	20,84
7. Lubuk Baja	37.948	35.934	73.882	10,77
8. Batu Ampar	63.893	64.335	128.228	18,70
Kota Batam	332.720	287.762	685.787	100,00

Sumber : Dinas Kependudukan Kota Batam

KADIN BUKA PERWAKILAN DI SINGAPURA

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Kepulauan Riau membuka kantor perwakilan di Singapura untuk membantu kesulitan pengusaha Singapura mencari mitra pengusaha lokal untuk berinvestasi di Provinsi Kepulauan Riau. Singapura saat ini sangat membutuhkan pasokan 100 ton sayur mayur dan hasil pertanian lainnya seperti buah segar setiap hari. Saat ini kebutuhan tersebut dipenuhi melalui impor dari Malaysia, Thailand dan India. Untuk memenuhi permintaan tersebut, akan dilakukan kerjasama dan dibukanya akses ekspor bagi produk sayur mayur yang dihasilkan Provinsi Kepulauan Riau melalui National Trade Union Congress (NTUC) Singapura – induk koperasi di negara itu—. Kerjasama tersebut meliputi kerjasama pembibitan dan produksi sayur mayur di sejumlah pulau di Kepulauan Riau terutama Kabupaten Karimun dan Lingga.

Provinsi Kepri memiliki potensi di sektor agribisnis disamping sektor pariwisata dan pertambangan yang selama ini dijadikan sebagai penghasil utama. Pemda melalui instansi-instansi terkait akan mempersiapkan teknis produksi sayur mayur yang berkualitas dan memenuhi standar internasional. DPRD Provinsi Kepulauan Riau bersama Gubernur akan menjajaki perlunya didirikan BUMD yang terdiri dari beberapa divisi yang mengurus berbagai macam potensi Provinsi Kepulauan Riau antara lain divisi sayur mayur, sembilan bahan pokok, atau bisnis-bisnis lain yang bisa digarap. Pembentukan BUMD tersebut diperkirakan segera terbentuk paling lambat bulan Maret setelah Perda yang mengatur pendirian BUMD tersebut selesai sekitar bulan Februari. Modal BUMD merupakan beban APBD Provinsi yang diperkirakan sebesar Rp 10 miliar. Selain itu diharapkan dengan berdirinya BUMD tersebut dapat menangani sembako, gula serta kebutuhan lainnya bagi masyarakat Kepri.

**BATAM SEBAGAI DAERAH PERCONTOHAN PENERAPAN ASEAN
SINGLE WINDOW**

Terkait dengan upaya untuk mengembalikan iklim investasi yang kondusif di Pulau Batam, Pemerintah telah memberikan kemudahan-kemudahan dan fasilitas khusus di bidang kepabeanan, fiskal dan perdagangan untuk pelaku usaha dan investor di Pulau Batam, Bintan dan Karimun. Terkait dengan hal tersebut, berdasarkan data yang tercatat di Badan Otorita Batam (BOB) bahwa perkembangan rencana investasi asing di Kota Batam pada triwulan III-2005 meningkat sebesar 100% untuk jumlah perusahaan baru yaitu dari 8 PMA pada triwulan II-2005 menjadi 16 PMA pada triwulan III-2005, meskipun demikian apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2004 terdapat penurunan rencana investasi PMA, dimana pada triwulan II-2004 berjumlah 15 PMA dan pada triwulan III-2004 berjumlah 20 PMA.

Secara geografis Batam adalah kota kepulauan sebagai pintu masuk utama (*main gateway*) bagi aktivitas perdagangan (ekspor/impor) bagi produk internasional, tujuan wisata manca negara (1,5 juta wisatawan pada tahun 2004), serta tujuan investasi dimana sampai dengan November 2005 tercatat 806 PMA yang tersebar pada 17 kawasan industri. Sebagai kota yang memiliki *linkage* ekonomi yang kuat dengan Singapura, maka industrialisasi di Batam harus diikuti pula dengan modernisasi administrasi pelayanan dalam segala bidang (*e-service*).

Langkah maju pelayanan *e-service* tengah dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Batam khususnya dengan sistem *e-registration* dan *e-taxation* yang secara resmi diluncurkan pada tanggal 21 Desember 2005 oleh Dirjen Pajak. Hal yang sama juga terdapat pada sistem pelayanan kebeacukaaian (*e-customs*) yang sedang memodernisasi sistem penanganan proses ekspor impor yang serba computerized melalui Electronic Data Interchange (EDI). Hal ini sejalan dengan rencana Dirjen Bea dan Cukai Depkeu untuk menjadikan Batam sebagai *pilot project implementation national single window* di tahun 2006. Program ini diharapkan akan dapat mendukung percepatan pelayanan dan memiliki keunggulan di bidang kepelabuhanan yang sekaligus dapat mendukung beroperasinya Tempat Penampungan Sementara (TPS) bagi penanganan barang-barang di pelabuhan yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2006.

Bab 2

Perkembangan Inflasi

1. KONDISI UMUM

Inflasi IHK selama Triwulan IV-2005 mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan triwulan sebelumnya, yaitu dari 1,52% pada Triwulan III-2005 menjadi 9,72% pada Triwulan IV-2005. Secara nasional, inflasi IHK selama triwulan IV-2005 juga mengalami peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya.

Tingkat inflasi IHK Provinsi Kepri yang diwakili oleh Kota Batam masih lebih rendah bila dibandingkan dengan inflasi IHK di Pekanbaru dan nasional. Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing serta suku bunga perbankan yang cenderung meningkat. Hal ini merupakan salah satu respon kebijakan moneter yang cenderung ketat (*tight bias*) yang diterapkan sejak pertengahan tahun 2004. Disamping itu tekanan terhadap harga-harga menjelang hari natal, tahun baru dan tahun ajaran baru turut mempengaruhi laju kenaikan harga.

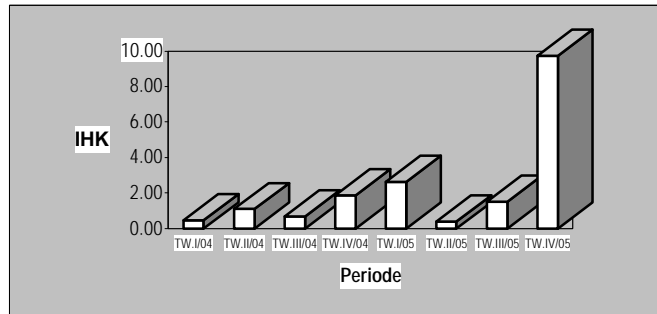
Pengukuran laju inflasi Kota Batam adalah berdasarkan tingkat Indeks Harga Konsumen (IHK) pada 7 (tujuh) kelompok barang, dimana secara triwulanan ($q-t-q$) laju inflasi Kota Batam pada triwulan I-2005 mencapai 2,65% dan mengalami perlambatan pada triwulan II-2005 yang mencapai 0,39%, dan meningkat menjadi 1,52% pada triwulan III-2005 dan 9,72% pada triwulan IV-2005. Sementara itu, laju inflasi secara tahunan ($y-o-y$) mengalami peningkatan dari 4,22% pada tahun 2004 menjadi 14,79% pada tahun 2005.

Percepatan laju inflasi IHK Kota Batam pada triwulan IV-2005 sebagian besar dipengaruhi oleh peningkatan IHK pada kelompok transportasi, komunikasi & jasa keuangan 23,06%; makanan jadi, minuman, rokok & tembakau sebesar 10,3%; kelompok bahan makanan sebesar 9,6%; kelompok perumahan, air, listrik, gas & bahan bakar sebesar 5,98%. Peningkatan laju inflasi IHK Kota Batam pada triwulan IV-2005 untuk kelompok transportasi, komunikasi & jasa keuangan mengalami peningkatan terbesar

dimana laju inflasi IHK terbesar terjadi pada bulan Oktober 2005 yang mencapai 22,98%.

Grafik perkembangan laju inflasi Kota Batam terdapat pada grafik 2.1

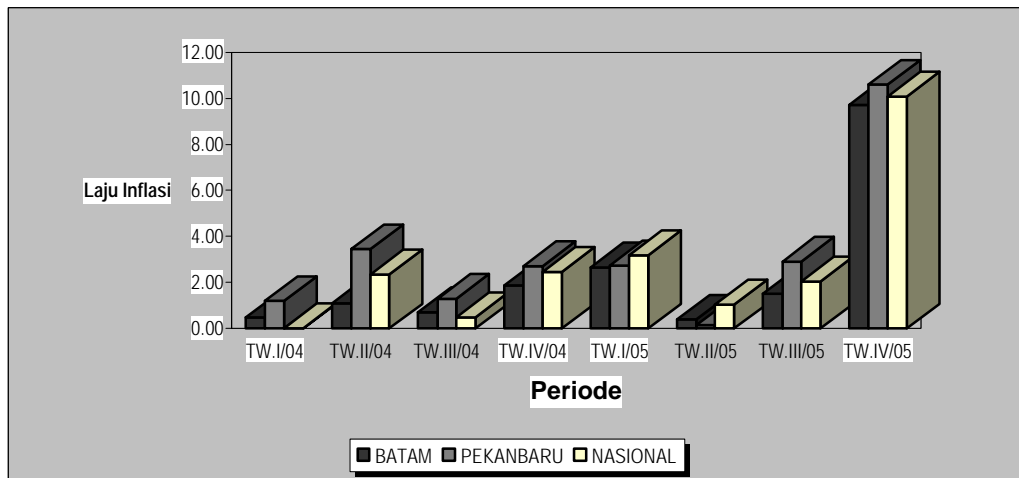
Grafik 2.1
Perkembangan Laju Inflasi Batam



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Batam

Pergerakan tingkat IHK di Provinsi Kepri, Pekanbaru dan Nasional mengalami pergerakan yang searah selama triwulan berjalan, dimana ketiganya mengalami peningkatan laju inflasi dibandingkan triwulan sebelumnya. Perkembangan inflasi Kota Batam, Pekanbaru dan Nasional dapat dilihat pada grafik 2.2

Grafik 2.2
Perkembangan Inflasi Kota Batam, Pekanbaru dan Nasional



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Batam

Perkembangan laju inflasi kota Batam selama triwulan IV-2005 dapat dilihat pada Tabel 2.1

Tabel 2.1
Perkembangan Inflasi Kota Batam

dalam persen (%)

Kelompok Pengeluaran	Tw.II 2005	OKT	NOV	DES	Tw. IV 2005
Umum	1,52	7,95	1,95	(0,30)	9,60
1. Bahan Makanan	2,21	7,73	4,31	(1,74)	10,30
2. Mknn jd, mnman, rokk & tembakau	0,69	2,76	2,94	0,28	5,98
3. Prumhn, air, lstrk, gas & bhan bakar	1,46	3,21	1,06	0,11	4,38
4. Sandang	2,65	0,59	0,63	0,54	1,76
5. Kesehatan	1,30	0,13	0,45	0,88	1,46
6. Pendidikan, rekreasi dan olahraga	6,98	0,42	(0,67)	0,88	0,63
7. Transpor, komunikasi & jasa keu	0,03	22,98	0,06	0,02	23,06

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Batam

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa terdapat peningkatan laju inflasi pada beberapa komoditi selama triwulan IV-2005, yaitu: kelompok bahan makanan; kelompok makanan jadi, minuman, rokok & tembakau; kelompok perumahan, air, listrik, gas & bahan bakar; kelompok kesehatan; kelompok pendidikan, rekreasi & olahraga; kelompok kesehatan serta kelompok transport, komunikasi & jasa keuangan. Sementara kelompok yang mengalami perlambatan laju inflasi terdapat pada kelompok sandang; dan kelompok pendidikan, rekreasi & olahraga. dan kelompok pendidikan rekreasi & olahraga

Sementara itu, Kota Batam mengalami deflasi pada bulan Desember 2005 sebesar 0,30% dimana kelompok komoditi yang memberikan sumbangan terbesar terdapat pada kelompok perumahan, air, listrik, gas & bahan bakar (0,07%), kelompok sandang (0,05%), dan kelompok kesehatan (0,03%).

PERKEMBANGAN INFLASI

Perkembangan inflasi dan andil inflasi berdasarkan kelompok komoditi untuk kota Batam pada bulan September 2005 dapat dilihat pada tabel 2.2

Tabel 2.2
Tingkat Inflasi dan Andil Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2005

dalam persen (%)

Kelompok Pengeluaran	Inflasi	Andil Inflasi
UMUM	(0,30)	0,02
1. Bahan Makanan	(1,74)	(0,46)
2. Mknn Jdi, Minuman, Rokok & Tembakau	0,28	0,05
3. Perumahan	0,11	0,03
4. Sandang	0,54	0,02
5. Kesehatan	0,88	0,03
6. Pendidikan, Rekreasi & Olah Raga	0,88	0,03
7. Transportasi dan Komunikasi	0,02	0,00

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Batam

2. INFLASI BERDASARKAN KELOMPOK KOMODITI

Pergerakan laju inflasi Kota Batam pada triwulan III-2005 secara triwulanan (q-t-q) mengalami peningkatan terhadap triwulan sebelumnya, yaitu dari 0,39% menjadi 1,52%. Pengaruh terbesar pembentuk laju IHK Kota Batam pada triwulan III-2005 terdapat pada bulan Agustus 2005 (0,86%) dengan laju IHK terbesar terdapat pada kelompok pendidikan, rekreasi & olahraga (6,12%). Sementara itu pada bulan September inflasi yang terjadi sebesar 0,02% dengan laju IHK terbesar terdapat pada kelompok kesehatan (0,94).

Tabel 2.3
Perkembangan Inflasi Kota Batam Menurut Kelompok Komoditi
 dalam persen (%)

KELOMPOK KOMODITI	2004		2005			
	Tw. III	Tw. IV	Tw. I	Tw. II	Tw. III	Tw. IV
UMUM	0,70	1,89	2,65	0,39	1,52	9,60
1. Bahan Makanan	0,83	3,18	3,78	0,05	2,21	10,30
2. Makanan jadi, minuman, rokok	0,89	4,99	1,52	1,12	0,69	5,98
3. Perumahan	0,52	0,32	0,70	0,24	1,46	4,38
4. Sandang	0,54	1,25	1,00	1,09	2,65	1,76
5. Kesehatan	-0,12	0,07	0,67	1,17	1,30	1,46
6. Pendidikan, rekreasi & olahraga	1,11	0,34	0,07	0,14	6,98	0,63
7. Transportasi & komunikasi	0,69	0,04	7,20	0,03	0,03	23,06

Sumber : Badan Pusat Statistik -Kota Batam

Bab 3
Perkembangan Moneter, Perbankan dan Sistem
Pembayaran

1. KONDISI UMUM

Kinerja perekonomian Provinsi Kepulauan Riau tahun 2005, pertumbuhan ekonomi mencapai sebesar 6,16% dimana terdapat peningkatan dibandingkan pertumbuhan tahun 2004. Secara triwulanan (q-t-q) pada triwulan IV-2005 pertumbuhan tersebut mencapai angka sebesar 0,81% lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya. Untuk jumlah uang giral dan uang kuasi di wilayah kerja KBI Batam rata-rata mengalami peningkatan setiap triwulannya, sementara jumlah penyaluran kredit oleh bank umum juga mengalami peningkatan. Sementara itu, perkembangan indikator perbankan yang tercermin pada total asset, tingkat LDR, NPL's, serta jaringan kantor BPR juga mengalami peningkatan.

Di bidang sistem pembayaran untuk transaksi tunai selama triwulan IV-2005 mengalami *net outflow* sebesar Rp. 445,26 miliar. Begitu pula kegiatan kliring di wilayah kerja KBI Batam dengan nilai transaksi non tunai melalui kliring mencapai Rp 8,89 triliun (606.762 lembar).

2. MONETER

Dalam upaya mengendalikan tekanan inflasi dan sebagai upaya merespons potensi tekanan inflasi ke depan, kebijakan moneter cenderung ketat (*tight bias*) yang terus dilanjutkan pada triwulan IV-2005. Terkait dengan hal tersebut, selama triwulan IV-2005 BI-Rate mengalami peningkatan sebanyak 3 kali dengan kumulatif kenaikan sebesar 275 bps, yaitu dari 10% pada tanggal 6 September 2005, selanjutnya menjadi 11% pada 4 Oktober 2005, 12,25% pada 1 November 2005 dan pada tanggal 6 Desember 2005 menjadi 12,75%. Upaya ini dilakukan untuk mengendalikan tekanan inflasi yang berasal dari meningkatnya ekspektasi inflasi dan melemahnya nilai tukar. Kebijakan ini ditempuh dengan disertai penerapan beberapa langkah, yaitu: (1)

PERKEMBANGAN MONETER, PERBANKAN DAN SISTEM PEMBAYARAN

Menaikkan BI-Rate, (2) Menaikkan GWM, (3) Meningkatkan suku bunga FASBI 7 hari dan maksimum suku bunga penjaminan. Upaya pengendalian inflasi ini sejalan dengan kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk menurunkan harga akibat kenaikan harga BBM.

Perkembangan besaran moneter selama triwulan IV-2005 menunjukkan bahwa terdapat peningkatan tingkat suku bunga SBI, suku bunga simpanan, serta suku bunga kredit. Disamping itu, jumlah uang giral berupa simpanan masyarakat berbentuk giro, serta deposito terus mengalami peningkatan selama tahun 2005, sedangkan tabungan mengalami penurunan sebesar 4,18% dibanding tahun sebelumnya.

Tabel 3.1
Perkembangan Uang Giral dan Kuasi di Wilker KBI Batam

(dalam miliar rupiah)

Ket	2004		2005			
	Tw. III	Tw. IV	Tw. I	Tw. II	Tw. III	Tw. IV
Uang Giral	2.860,74	2.997,40	3.106,07	3.183,28	3.262,74	3.524,56
Giro	2.860,74	2.997,40	3.106,07	3.183,28	3.262,74	3.524,56
Uang Kuasi	4.309,85	4.723,65	4.700,43	4.937,68	5.111,04	5.182,59
Tabungan	2.900,98	3.144,82	3.084,28	3.132,15	3.040,04	3.013,30
Deposito	1.408,87	1.578,82	1.616,15	1.805,53	2.070,10	2.169,29
Total	7.170,59	7.721,05	7.806,50	8.120,96	8.373,78	8.707,15

Sumber : Bank Indonesia

Peningkatan jumlah uang kuasi untuk wilayah kerja KBI Batam pada triwulan laporan, diikuti juga peningkatan uang giral dimana sampai dengan triwulan IV-2005 mengalami peningkatan sebesar Rp. 261,82 miliar (8,02%) dibandingkan dengan triwulan III-2005. Hal tersebut diikuti juga oleh pergerakan suku bunga simpanan yang cenderung meningkat. Untuk triwulan IV-2005 rata-rata suku bunga simpanan berjangka 3 bulan mencapai 9.89%, tingkat suku bunga tabungan sebesar 10.63%, dan tingkat suku bunga kredit modal kerja serta kredit investasi masing-masing sebesar 15,98% dan 16,64%. Perkembangan

PERKEMBANGAN MONETER, PERBANKAN DAN SISTEM PEMBAYARAN

suku bunga perbankan di wilker KBI Batam dapat dilihat pada tabel 3.2.

Tabel 3.2
Perkembangan Suku Bunga (%)

Keterangan	2004				2005			
	Tw. I	Tw. II	Tw. II I	Tw. IV	Tw. I	Tw. II	Tw. II I	Tw. IV
SBI 1 bulan	7.42	7.34	7.39	7.43	7.44	8.25	10	12.75
DPK *)								
Giro	11.21	10.75	9.25	14.6	14,72	6	6	6
Tabungan	10.15	9.88	10	9.6	8,88	14,71	9,33	10,63
Deposito 3 bulan	8.25	7.5	8.41	6.73	6,47	7,03	7,31	9.89
Kredit *)								
Modal Kerja	15.88	17.75	17.88	17.88	17,62	13,25	13,62	15.98
Investasi	14.28	17.75	18	18	17,53	13,71	14,76	16.64

Sumber : Bank Indonesia

*) Nilai rata-rata, yaitu: (nilai tertinggi+nilai terendah)/2

Jika dilihat tabel 3.2, terjadi peningkatan suku bunga simpanan dalam bentuk deposito, suku bunga giro yang tidak mengalami perubahan serta tingkat suku bunga tabungan yang menurun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

3. PERBANKAN

Indikator-indikator perbankan di Provinsi Kepulauan Riau sampai dengan triwulan III-2005 menunjukkan kecenderungan peningkatan yang tercermin pada total asset, jumlah simpanan serta total kredit yang diberikan oleh perbankan.

Tabel 3.3
Perkembangan Indikator Perbankan di Wilker KBI Batam

Indikator	Periode				
	2004	2005			
		Tw. I	Tw. II	Tw. III	Tw. IV
1. Jaringan Kantor BU	32	34	33	33	33
a. Batam	21	23	23	23	23
b. Tanjung Pinang	7	7	7	7	7
c. Tj. Balai Karimun	3	3	2	2	2
d. Natuna	1	1	1	1	1
2. Jaringan Kantor BPR	4	5	8	9	10
a. Batam	3	4	6	6	7
b. Tanjung Pinang	-	-	1	2	2
c. Tj. Balai Karimun	1	1	1	1	1
d. Natuna	-	-	-	-	-
3. Total Asset	9.427.598	9.316.232	9.715.095	10.213.912	10.666.450
a. Batam	6.703.118	7.077.782	7.601.663	8.022.161	8.188.109

PERKEMBANGAN MONETER, PERBANKAN DAN SISTEM PEMBAYARAN

Indikator	Periode				
	2004	2005			
		Tw. I	Tw. II	Tw. III	Tw. IV
b. Tanjung Pinang	1.749.929	1.718.356	1.718.891	1.768.540	1.950.983
c. Tj. Balai Karimun	442.855	406.736	267.007	271.785	311.010
d. Natuna & Tj. Uban	104.600	113.358	127.534	151.426	216.348
4. Total DPK	7.721.045	7.806.495	8.120.960	8.373.778	8.707.149
a. Batam	5.458.347	5.599.666	6.049.847	6.224.301	6.269.948
b. Tanjung Pinang	1.724.321	1.692.427	1.678.209	1.728.343	1.916.705
c. Tj. Balai Karimun	437.779	400.665	263.969	268.182	306.791
d. Natuna	100.598	113.737	128.935	152.952	213.705
5. Total Kredit	4.397.899	4.761.130	5.104.373	5.685.474	5.877.399
a. Batam	3.763.287	4.121.633	4.465.106	4.988.122	5.138.278
b. Tanjung Pinang	498.143	501.424	521.712	571.737	607.850
c. Tj. Balai Karimun	120.798	120.940	97.217	102.511	108.393
d. Natuna	15.671	17.133	20.338	23.104	22.878
6. LDR	56,96%	60,99%	62,85%	63,68%	67,50%
a. Batam	68,95%	73,60%	73,81%	74,90%	81,95%
b. Tanjung Pinang	28,89%	29,63%	31,09%	30,63%	31,71%
c. Tj. Balai Karimun	27,59%	30,18%	36,83%	38,25%	35,33%
d. Natuna	15,58%	15,06%	15,77%	16,49%	10,71%
7. NPL's	2,67%	2,72%	4,12%	4,56%	6,01%
a. Batam	2,84%	2,85%	4,43%	3,80%	5,17%
b. Tanjung Pinang	1,94%	2,13%	2,24%	12,09%	14,28%
c. Tj. Balai Karimun	0,81%	0,86%	0,99%	1,21%	0,69%
d. Natuna	0,15%	0,14%	0,03%	0,03%	0%

Sumber : Bank Indonesia

3.1 Perkembangan Total Asset Bank Umum

Sampai dengan triwulan IV-2005, total asset bank umum yang berada di wilayah kerja Kantor Bank Indonesia Batam mencapai Rp 10,666 triliun dan mengalami peningkatan 5,13% dibanding triwulan III-2005 yang tercatat sebesar Rp 10.214 triliun. Total asset terbesar dimiliki oleh Bank Swasta (Rp5,391 triliun), Bank Pemerintah (Rp 4,410 triliun) dan BPD Riau (Rp 0,865 triliun). Perkembangan total asset per wilayah kerja KBI Batam ditunjukkan pada tabel 3.4

PERKEMBANGAN MONETER, PERBANKAN DAN SISTEM PEMBAYARAN

Tabel 3.4
Perkembangan Total Asset Perbankan
di Wilayah Kerja KBI Batam

(miliar rupiah)

Lokasi	2004				2005				Pertumb (%)	
	Tw.1	Tw.2	Tw.3	Tw.4	Tw.1	Tw.2	Tw.3	Tw.4	q-t-q	y-o-y
Kota Batam	5.027	5.574	6.142	6.703	7.078	7.602	8.022	8.188	2,07	22,15
Kota	1.591	1.672	1.624	1.750	1.718	1.719	1.769	1.951	10,29	11,49
Tj.Pinang	534	540	497	547	520	395	423	527	24,59	-3,66
Kepln Riau*)										
Total	7.152	7.787	8.263	9.000	9.316	9.716	10.214	10.666	4,43	18,51
Nasional (triliun Rp)	1.115	1.152	1.171	1.215	1.224	1.279	1.357	1.410	5,51	16,90

*) wilayah Kepulauan Riau meliputi Tj.Uban, Kab. Tanjung Balai Karimun dan Kab. Natuna

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pertumbuhan asset terbesar secara triwulanan (q-t-q) terdapat pada wilayah Kepulauan Riau, dan secara tahunan (y-o-y) terdapat di Kota Batam, kecuali untuk Kepulauan Riau dimana secara tahunan mengalami penurunan karena berkurangnya jumlah bank pelapor akibat penurunan status kantor cabang menjadi kantor cabang pembantu di Tanjung Balai Karimun dan pada triwulan laporan terdapat 2 kantor cabang yang merupakan bank pelapor.

Secara nasional, jumlah asset bank umum (termasuk bank umum yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah) sebesar Rp.1.410 triliun sehingga total asset bank umum di wilayah KBI Batam terhadap total asset bank umum nasional sebesar 0,76%.

Jika dilihat dari kelompok bank, pertumbuhan total asset terbesar berasal dari kelompok Bank Pembangunan Daerah Riau sebesar 24,59%, diikuti oleh kelompok bank swasta yang mencapai 10,29%, dan kelompok bank pemerintah 2,07%.

Selama triwulan laporan tidak ada peningkatan jumlah kantor bank umum yang beroperasi di wilayah kerja Bank Indonesia Batam yaitu tetap sebanyak 23 bank terdiri dari : 4 Bank Umum Pemerintah, 1 Bank Pembangunan Daerah Riau, 1 Bank Swasta Asing, 1 Bank Swasta Campuran, dan 16 Bank Swasta Nasional. Sedangkan dari sisi jumlah kantor selama triwulan IV-

PERKEMBANGAN MONETER, PERBANKAN DAN SISTEM PEMBAYARAN

2005 terdapat 123 kantor bank umum termasuk kantor BRI Unit, 7 kantor BPD. Untuk jumlah Anjungan Tunai Mandiri (ATM) pada triwulan IV-2005 sebanyak 291 ATM.

Grafik 3.1
Grafik Perkembangan Total Asset Bank Umum di Wilayah Kerja KBI Batam



Sumber : Bank Indonesia

3.2 Perkembangan Penghimpunan Dana Bank Umum

Penghimpunan dana masyarakat di bank umum selama triwulan laporan mencapai Rp 8,707 triliun dan meningkat sebesar Rp 333,37 miliar (3,98%) dibandingkan triwulan III-2005. Sementara terhadap posisi Desember 2004 (y-o-y) terdapat peningkatan sebesar Rp 986,10 miliar (12,77%).

Simpanan berbentuk giro memiliki jumlah terbesar sampai dengan triwulan IV-2005 yang mencapai Rp 3,525 triliun, diikuti oleh tabungan sebesar Rp 3,013 triliun dan deposito sebesar Rp 2,169 triliun. Data ini menunjukkan bahwa masyarakat penyimpan di wilker KBI Batam lebih cenderung memilih simpanan berbentuk giro dan tabungan yang bersifat likuid dibandingkan simpanan berjangka. Hal ini antara lain dipengaruhi oleh sektor ekonomi industri dan perdagangan yang merupakan sektor andalan di Provinsi Kepulauan Riau sehingga masyarakat membutuhkan dana yang mudah dicairkan untuk kebutuhan transaksi dan kegiatan perekonomiannya. Sementara itu, berdasarkan data pada tabel 3.4, persentase peningkatan giro paling besar sebesar 8,03% (q-

PERKEMBANGAN MONETER, PERBANKAN DAN SISTEM PEMBAYARAN

t-q), sedangkan deposito meningkat 4,75% sedangkan tabungan menurun sebesar -0,88%. Simpanan giro mengalami peningkatan rata-rata 4,16% per triwulan selama tahun 2005. Demikian juga halnya dengan simpanan deposito yang meningkat cukup tinggi ini mulai terlihat sejak triwulan II-2005 yang meningkat sebesar 11,72%, pada triwulan III-2005 meningkat sebesar 14,70% dan mengalami peningkatan pada triwulan IV sebesar 4,75%. Sedangkan dana pihak ketiga berupa tabungan cenderung mengalami penurunan dimana dari triwulan I-2005 menurun sebesar -1,94% terhadap triwulan IV-2004, triwulan II-2005 hanya meningkat sebesar 1,55% terhadap triwulan I-2005, serta pada triwulan III-2005 dan triwulan IV-2005 menurun masing-masing sebesar -2,94% dan -0,88%. Peningkatan jumlah dana deposito antara lain akibat adanya *redemption* (penarikan dalam jumlah besar) reksa dana oleh para nasabah yang selanjutnya dana tersebut dialihkan ke deposito. Selain itu, faktor suku bunga deposito yang cukup tinggi juga menjadi salah satu daya tarik nasabah untuk mengalihkan dananya di deposito. Untuk perkembangan dana yang dapat dihimpun oleh bank umum yang berada di wilayah kerja KBI Batam sampai dengan triwulan IV-2005 dapat dilihat tabel 3.5.

Tabel 3.5
Penghimpunan Dana Bank Umum di Wilker KBI Batam

(miliar rupiah)

Keterangan	2004				2005				Pertumb Tw.3/05(%) q-t-q
	Tw.1	Tw.2	Tw.3	Tw.4	Tw.1	Tw.2	Tw.3	Tw.4	
Bank Umum	6.263	6.758	7.171	7.721	7.806	8.121	8.374	8.707	3,98
Giro	2.398	2.746	2.861	2.997	3.106	3.183	3.263	3.525	8,03
Deposito	1.329	1.270	1.409	1.579	1.616	1.806	2.071	3.013	45,48
Tabungan	2.536	2.742	2.901	3.145	3.084	3.132	3.040	2.169	-28,65
Bank Pem*)	2.898	2.975	3.175	3.395	3.413	3.614	3.702	4.072	10,00
Giro	865	917	1.049	1.103	1.207	1.284	1.363	1.639	20,25
Deposito	668	571	569	584	601	667	727	1.684	131,64
Tabungan	1.365	1.487	1.558	1.707	1.605	1.993	1.612	749	-53,54

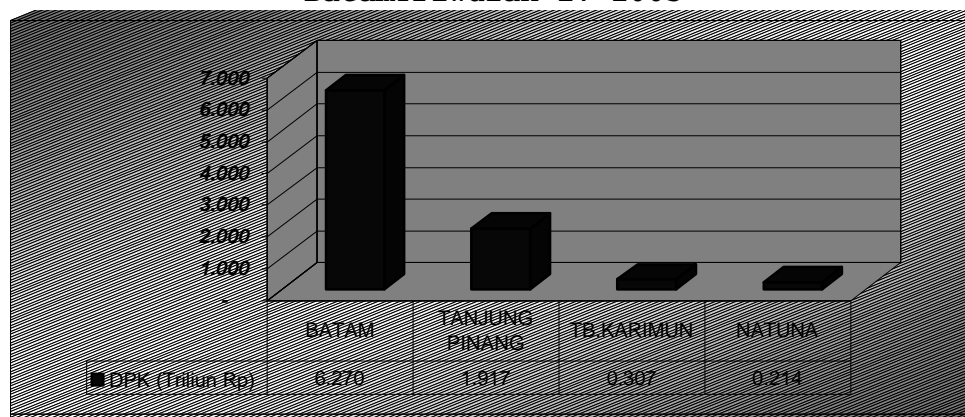
PERKEMBANGAN MONETER, PERBANKAN DAN SISTEM PEMBAYARAN

Keterangan	2004				2005				Pertumb Tw.3/05(%) q-t-q
	Tw.1	Tw.2	Tw.3	Tw.4	Tw.1	Tw.2	Tw.3	Tw.4	
Bank Swasta	3.365	3.783	3.995	4.326	4.393	4.507	4.672	4.635	-0,79
Giro	1.533	1.829	1.812	1.894	1.899	1.899	1.899	1.886	-0,69
Deposito	661	699	840	994	1.015	1.469	1.344	1.329	-1,12
Tabungan	1.171	1.255	1.343	1.437	1.479	1.139	1.428	1.420	-0,56

Sumber : Bank Indonesia Batam *)Termasuk BPD Riau

Kelompok Bank Swasta selama triwulan laporan masih mendominasi tingkat perpencaran DPK yang mencapai 53,23% dengan komposisi giro sebesar 53,50%, tabungan sebesar 44,11% dan deposito berjangka sebesar 65,46% terhadap total DPK Bank Umum. Sedangkan komposisi DPK berdasarkan wilayah menunjukkan bahwa Kota Batam masih memberikan kontribusi terbesar, yaitu Rp 6,270 triliun (72,01%), diikuti oleh Tanjung Pinang sebesar Rp.1,917 triliun (22,02%), sedangkan untuk Tanjung Balai Karimun sebesar Rp.0,307 triliun (3,52%) dan wilayah Natuna sebesar Rp.0,214 triliun (2,45%). Data tersebut dapat dilihat pada grafik 3.2

Grafik 3.2.
Perkembangan Total DPK Bank Umum di Wilker KBI
Batam Triwulan IV-2005



Sumber : Bank Indonesia

3.3 Perkembangan Penyaluran Kredit Bank Umum

Jumlah kredit yang disalurkan oleh bank umum di wilayah kerja Bank Indonesia Batam sampai dengan triwulan IV-2005

PERKEMBANGAN MONETER, PERBANKAN DAN SISTEM PEMBAYARAN

mencapai Rp 5,877 triliun dan secara triwulanan meningkat sebesar Rp 191,93 miliar (3,38%) yaitu dari Rp.5,685 triliun di triwulan III-2005. Penyaluran kredit terbesar terdapat pada kelompok Bank Pemerintah (termasuk BPD) sebesar Rp.3,203 triliun, sedangkan Bank Swasta sebesar Rp 2,675 triliun. Sementara itu, untuk data nasional jumlah penyaluran kredit dalam rupiah oleh Bank Umum posisi Desember 2005 mencapai Rp.566 triliun, sehingga nilai kredit bank umum di wilker KBI Batam dibandingkan nilai kredit bank umum nasional mencapai 1,04%.

Untuk mendorong fungsi intermediasi dan percepatan konsolidasi perbankan, peningkatan kemampuan perbankan dalam pengelolaan risiko kredit, penerapan prinsip kehati-hatian dan praktik perbankan yang sehat, serta meningkatkan perlindungan nasabah melalui kepastian penerapan standar pelayanan perbankan yang baku, aman dan terpercaya, maka dikeluarkan kebijakan Bank Indonesia pada bulan Januari 2005 yaitu Peraturan Bank Indonesia (PBI) tentang : Pelonggaran BMPK, Sistem Informasi Debitur, Sekuritisasi Aset Kualitas Aktiva Produktif, BMPK Pembelian Saham Bank, Pinjaman Luar Negeri, Perlindungan Nasabah dan Transparansi Produk Perbankan yang akan mulai diberlakukan pada bulan Juli 2005. Mulai Juli 2005, Bank Indonesia telah mengimplementasikan penguatan kerangka kerja kebijakan moneter yang konsisten dengan *Inflation Targeting Framework* (ITF) yang mencakup 4 (empat) elemen dasar, yaitu (1) penggunaan suku bunga BI Rate sebagai *policy reference rate*, (2) proses perumusan kebijakan moneter yang antisipatif, (3) strategi komunikasi yang lebih transparan, dan (4) penguatan koordinasi kebijakan dengan Pemerintah. Langkah-langkah dimaksud ditujukan untuk meningkatkan efektivitas dan tata kelola (*governance*) kebijakan moneter dalam mencapai sasaran akhir kestabilan harga untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, Bank Indonesia sesuai dengan Arsitektur Perbankan Indonesia (API) mulai membangun skema asuransi kredit dengan bekerja sama dengan pihak lain. Perkembangan outstanding

PERKEMBANGAN MONETER, PERBANKAN DAN SISTEM PEMBAYARAN

kredit bank umum di wilayah kerja Bank Indonesia Batam dapat dilihat pada tabel 3.6

Tabel 3.6
Perkembangan Outstanding Kredit Bank Umum di Wilayah Kerja Bank Indonesia Batam

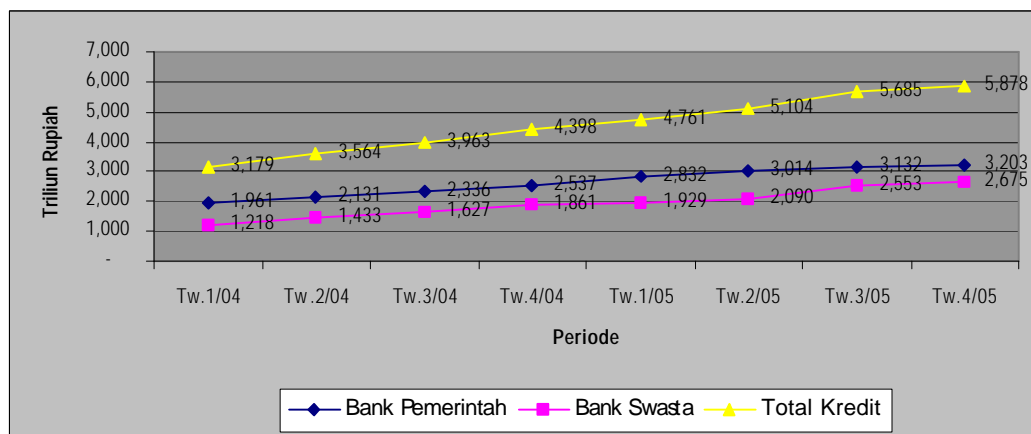
(dalam miliar rupiah)

URAIAN	2004		2005				Pertumbuhan	
	Tw.3	Tw.4	Tw.1	Tw.2	Tw.3	Tw.4	q-t-q	y-o-y
Total Kredit	3.962,7	4.397,9	4.761,1	5.104,4	5.685,5	5.877,4	3,38	33,64
Bank Pem *)	2.336,0	2.537,4	2.832,2	3.014,3	3.132,4	3.202,9	2,25	26,23
Bank Swasta	1.626,8	1.860,5	1.928,9	2.090,1	2.553,1	2.674,5	4,76	43,75

Sumber : Bank Indonesia *)
termasuk BPD Riau

Berdasarkan data pada tabel 3.6 diatas, terlihat bahwa perkembangan *outstanding* kredit bank umum selama 2 tahun terakhir menunjukkan peningkatan. Untuk pergerakan *outstanding* kredit bank umum dapat dilihat pada grafik 3.3

Grafik 3.3
Perkembangan Outstanding Kredit Bank Umum di Wilker KBI Batam



Sumber : Bank Indonesia

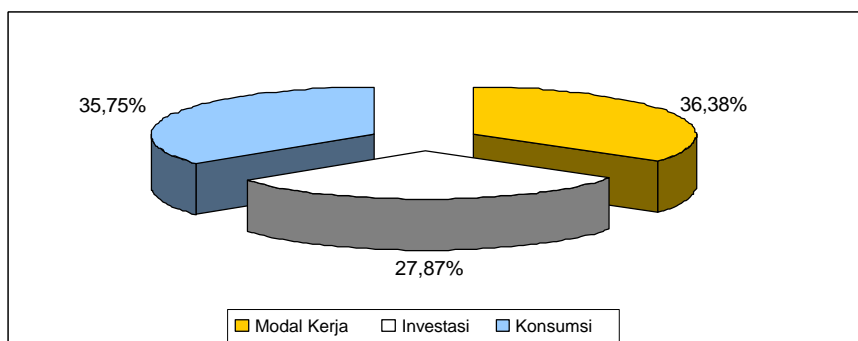
Jika dilihat dari jenis penggunaannya, dibandingkan pada triwulan sebelumnya terdapat pada triwulan IV-2005 kredit modal kerja mengalami peningkatan terbesar (q-t-q) sebesar 8,97% dari Rp.1,962 triliun pada Triwulan III-2005 menjadi Rp. 2,138

PERKEMBANGAN MONETER, PERBANKAN DAN SISTEM PEMBAYARAN

triliun pada triwulan laporan, sedangkan Kredit Konsumsi mengalami peningkatan 4,53% yaitu dari Rp 2,010 triliun pada triwulan III-2005 menjadi Rp.2,102 triliun pada triwulan laporan. Sementara itu, Kredit Modal Kerja mengalami penurunan pada triwulan laporan sebesar -4,38% yaitu dari Rp.1,713 triliun pada triwulan III-2005 menjadi Rp. 1,638 triliun pada triwulan laporan.

Untuk komposisi penyaluran kredit berdasarkan jenis penggunaan, dapat dilihat pada grafik 3.4

Grafik 3.4
Komposisi Penyaluran Kredit di Wilker KBI Batam Triwulan IV-2005



Sumber: Bank Indonesia

Perkembangan penggunaan kredit terhadap posisi Desember 2004, peningkatan terbesar terdapat pada kredit konsumsi (40,41%), diikuti oleh kredit investasi (31,36%) dan kredit modal kerja (29,26%). Hal ini mengindikasikan bahwa penyaluran kredit perbankan lebih dominan kepada sektor konsumtif.

Tabel 3.7
Perkembangan Penyaluran Kredit Bank Umum
(dalam miliar rupiah)

Keterangan	Tw.1 2004	Tw.2 2004	Tw.3 2004	Tw.4 2004	Tw.1 2005	Tw.2 2005	Tw.3 2005	Tw.4 2005	Pert % qtq	Pert % yoy
Sektor Ekonomi	3.179	3.564	3.963	4.398	4.761	5.104	5.685	5.877	3,38	33,63
Pertanian	72	81	86	118	120	129	130	148	13,85	25,42
Pertambangan	16	18	69	49	43	42	51	59	15,69	20,41
Industri	637	736	769	685	847	811	1.059	1.025	-3,21	49,64
Listrik, Gas, Air	0,3	0,152	0,107	0,206	0,131	0,322	2	2	0	870,87
Konstruksi	202	219	244	478	544	573	631	579	-8,24	21,13
Perdag, Htl&Res	841	904	1.015	1.136	1.133	1.223	1.279	1.332	4,14	17,25
Angkutan	52	57	64	57	61	61	78	99	26,92	73,68

PERKEMBANGAN MONETER, PERBANKAN DAN SISTEM PEMBAYARAN

Keterangan	Tw.1 2004	Tw.2 2004	Tw.3 2004	Tw.4 2004	Tw.1 2005	Tw.2 2005	Tw.3 2005	Tw.4 2005	Pert % qtq	Pert % yoy
Jasa-jasa	226	298	330	372	408	434	439	451	2,73	21,24
Lainnya	1.133	1.251	1.386	1.502	1.604	1.831	2.017	2.106	4,41	40,21
Jenis Penggunaan	3.179	3.564	3.963	4.398	4.761	5.104	5.685	5.877	3,38	33,63
Modal Kerja	1.126	1.276	1.443	1.654	1.804	1.849	1.962	2.138	8,97	29,26
Investasi	923	1.040	1.137	1.247	1.359	1.433	1.713	1.638	-4,38	31,36
Konsumsi	1.130	1.248	1.382	1.497	1.598	1.822	2.011	2.102	4,53	40,41
Kelompok Bank	3.179	3.564	3.963	4.398	4.761	5.104	5.685	5.877	3,38	33,63
Bank Pemerinth	1.961	2.131	2.336	2.537	2.832	3.014	3.132	3.202	2,23	26,21
Bank Swasta	1.218	1.433	1.627	1.861	1.929	2.090	2.553	2.675	4,78	43,74

Sumber : Bank Indonesia

Dari sisi sektor ekonomi, selama triwulan IV-005, pertumbuhan kredit terbesar secara triwulanan (q-t-q) terdapat pada sektor Angkutan (26,92%). Sedangkan sektor perdagangan, hotel & restoran memiliki penyaluran kredit terbesar dengan nilai nominal terbesar yang mencapai Rp.1.332 triliun.

Tabel 3.8
Perkembangan Kolektibilitas Kredit, NIM, LDR Bank Umum di Wilayah Kerja KBI Batam

(dalam miliar rupiah)

Keterangan	2004			2005				Pertumb q-t-q (%)
	Tw.2	Tw.3	Tw.4	Tw.1	Tw.2	Tw.3	Tw.4	
Lancar	3.101,7 2	3.481,2 6	3.907,9 7	4.267,3 9	4.288,2 1	4.615,8 2	4.844,3 7	4,95
DPK	316,39	325,49	373,56	364,46	605,89	776,90	680,05	12,47
Kurang Lancar	42,40	50,08	26,66	21,27	46,59	63,02	86,67	37,54
Diragukan	67,97	49,57	44,11	54,41	33,56	79,63	23,72	-70,21
Macet	35,92	56,35	46,60	53,60	130,12	150,11	242,58	61,60
Total Kredit	3.564,4 0	3.962,7 5	4.397,9 0	4.761,1 3	5.104,3 7	5.685,4 7	5.877,4 0	3,38
NPLs	4,10%	3,94%	2,67%	2,72%	4,12%	5,15%	6,01%	0,86
Pendapatan Bunga	218,08	337,01	464,68	136,31	280,78	434,59	609,48	40,24
Beban Bunga	114,64	174,44	235,99	66,41	136,12	217,96	320,75	47,16
Aktiva Produktif	3.736,6 4	4.147,5 1	4.512,3 0	4.899,5 8	5.299,2 0	5.875,4 9	6.083,3 4	3,54
NIM	2,83%	3,99%	5,29%	1,47%	2,76%	3,77%	4,83%	28,12
DPK	6.758,1 8	7.170,5 9	7.721,0 5	7.806,5 0	8.120,9 6	8.373,7 8	8.707,1 5	3,98
LDR	52,74%	55,26%	56,96%	60,99%	62,85%	67,90%	67,50%	-0,40

Sumber : Bank Indonesia

Tabel diatas menunjukkan bahwa secara umum terjadi peningkatan dalam penyaluran kredit, namun rasio NPL meningkat dari 5,15% pada triwulan III-2005 menjadi 6,01% pada triwulan IV-2005 melebihi batas minimum yang ditetapkan Bank Indonesia sebesar 5%. Sementara itu, Net Interest Margin (NIM) relatif

PERKEMBANGAN MONETER, PERBANKAN DAN SISTEM PEMBAYARAN

meningkat dibandingkan triwulan III-2005 dari 3,77% menjadi 4,83% dan LDR menurun dari 67,90% menjadi 67,50% pada triwulan laporan.

Tabel 3.9
Penyebaran Kredit dan Penghimpunan Dana Bank Umum
(dalam miliar rupiah)

NO	KOTA/KAB	DPK	PANGSA	KREDIT	PANGSA	LDR
1.	Batam	6.269,95	72,01%	5.138,28	87,42%	81,95%
2.	Tanjung Pinang	1.916,71	22,02%	607,85	10,35%	31,71%
3.	Tj.Balai	306,79	3,52%	108,39	1,84%	35,33%
4.	Karimun Natuna	213,71	2,45%	22,88	0,39%	10,71%
JUMLAH		8.707,15	100%	5.877,40	100%	67,50%

Sumber : Bank Indonesia

Berdasarkan tabel 3.9 di atas, rasio *Loans to Deposit Ratio* (LDR) paling besar di Kota Batam sebesar 81,95%, sedangkan daerah lainnya masih dibawah 50% sehingga fungsi intermediasinya perlu ditingkatkan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.

3.4 Perkembangan Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Perkembangan Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sampai dengan triwulan laporan menunjukkan adanya pertumbuhan pada jumlah *outstanding* kredit, dimana posisi pada akhir triwulan IV-2005 tercatat sebesar Rp.3,107 triliun atau meningkat sebesar 305% dibandingkan triwulan III-2005. Sementara itu, untuk posisi tahunan (*y-o-y*), terjadi peningkatan sebesar Rp.677 miliar (28,94%).

Jika dilihat dari porsi kredit menurut sektor ekonomi, porsi terbesar terdapat pada sektor Lain-lain sebesar Rp 1.331,31 miliar (42,84%) diikuti oleh sektor perdagangan Rp 948,61 miliar (30,52%), sektor industri Rp 242,02 miliar (7,79%), sektor dunia usaha Rp 221,17 miliar (7,12%).

Dalam upaya meningkatkan sektor UMKM pada tahun 2005, perbankan dan Pemerintah Daerah telah berkomitmen untuk secara terus menerus melakukan pembinaan terhadap UMKM serta

PERKEMBANGAN MONETER, PERBANKAN DAN SISTEM PEMBAYARAN

meningkatkan penyaluran kredit dan dana bergulir, salah satunya adalah rencana pendirian beberapa Bank Perkreditan Rakyat. Disamping itu, upaya yang juga telah dilakukan untuk memberdayakan serta mengembangkan UMKM di daerah Provinsi Kepulauan Riau adalah dibentuknya Satuan Tugas Daerah Konsultan Keuangan/Pendamping UMKM Mitra Bank (KKMB) Provinsi Kepulauan Riau.

Perkembangan kredit UMKM di wilayah kerja KBI Batam sampai dengan Triwulan IV-2005 dapat dilihat pada tabel 3.10

Tabel 3.10
Perkembangan Kredit UMKM di Wilayah Kerja Bank Indonesia Batam
(dalam miliar rupiah)

no	Keterangan	2004		2005			
		Tw.3	Tw.4	Tw.1	Tw.2	Tw.3	Tw.4
1.	Kredit Mnrt Jenis Penggunaan	2.339,21	2.536,07	2.623,05	2.828,13	3.016,07	3.107,94
	- Modal Kerja	1.016,66	1.130,19	1.119,73	1.187,31	1.239,29	1.305,17
	- Investasi	392,15	425,59	426,54	445,89	466,99	476,33
	- Konsumsi	930,41	980,30	1.076,79	1.194,92	1.309,79	1.326,44
2.	Kredit Menurut Sektor Ekonomi	2.339,21	2.536,07	2.623,05	2.828,13	3.016,07	3.107,94
	- Pertanian	17,09	23,52	21,16	23,37	24,03	25,26
	- Pertambangan	48,30	31,16	37,19	37,08	33,48	39,34
	- Industri	196,93	228,85	197,60	208,39	225,30	242,02
	- Listrik	0,11	0,21	0,13	0,32	2,40	2,24
	- Konstruksi	148,03	152,98	163,47	182,71	202,59	189,28
	- Perdagangan	728,56	822,83	817,67	873,45	908,62	948,61
	- Pengangkutan	53,50	46,87	51,02	50,90	53,51	60,34
	- Dunia Usaha	174,37	200,52	210,07	195,25	205,84	221,17
	- Jasa	38,32	43,67	41,74	53,29	44,21	48,38
	- Lain-lain	934,01	985,44	1.083,00	1.203,37	1.316,10	1.331,31

Sumber : Bank Indonesia

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Koperasi dan UKM, hingga saat ini terdapat 455 koperasi di Kota Batam yang tersebar pada 8 kecamatan, sementara jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Kota Batam berjumlah 9.898 unit yang bergerak di berbagai sektor usaha antara lain: sektor perikanan, pertanian, peternakan, perdagangan, industri kecil/rumah tangga, serta aneka jasa.

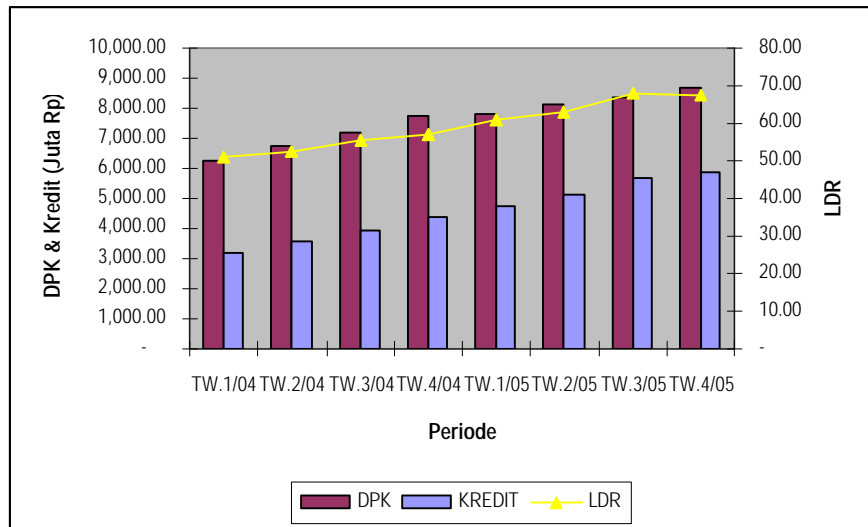
3.5 Loans to Deposit Ratio (LDR)

Tingkat *Loan to Deposit Ratio* (LDR) perbankan sampai dengan triwulan IV-2005 sebesar 67,50%. Tingkat LDR tersebut menunjukkan bahwa fungsi intermediasi perbankan di wilayah kerja KBI Batam masih cukup tinggi meskipun terdapat tekanan

PERKEMBANGAN MONETER, PERBANKAN DAN SISTEM PEMBAYARAN

yang cukup besar pada tingkat suku bunga serta nilai tukar rupiah. Jumlah Kota/Kabupaten di wilayah Propinsi Kepulauan Riau sebanyak 6 (enam) Kota/Kabupaten, dimana secara umum pertumbuhan ekonomi dan perbankan masih didominasi oleh Kota Batam yang merupakan kota industri dan didukung oleh kegiatan perdagangan yang cukup tinggi mempengaruhi besarnya jumlah penyaluran kredit oleh perbankan, dimana sektor perdagangan dan industri masih menempati posisi terbesar yang mendapatkan perolehan kredit.

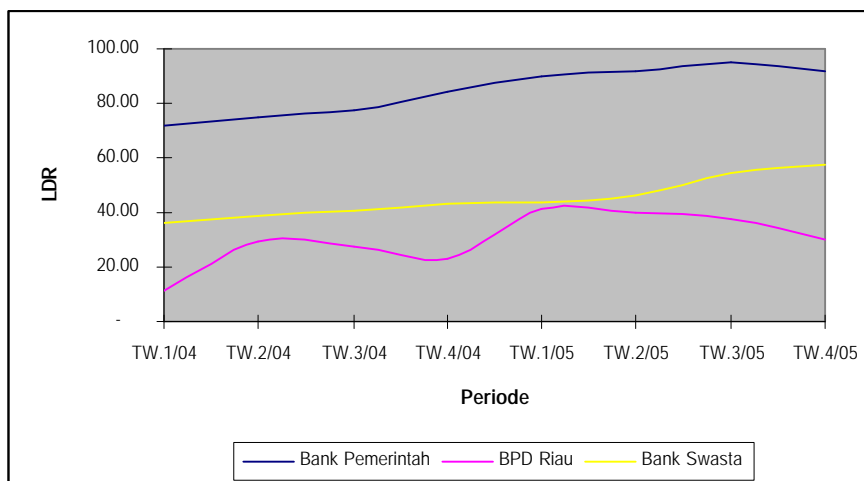
Grafik 3.5
Perkembangan LDR Bank Umum di Wilker KBI Batam



Sumber : Bank Indonesia

Berdasarkan kelompok bank, tingkat LDR pada Bank Pemerintah merupakan yang tertinggi yaitu mencapai 91,59%, BPD Riau mencapai 29,94% dan bank swasta sebesar 57,71%. Data tersebut menunjukkan bahwa tingkat LDR secara triwulanan untuk Bank Pemerintah dan Bank swasta mengalami peningkatan dibandingkan triwulan III-2005.

Grafik 3.6
Perkembangan LDR Menurut Kelompok Bank Umum



Sumber: Bank Indonesia

3.6 Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Sampai dengan triwulan IV-2005, jumlah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang beroperasi di wilayah kerja Kantor Bank Indonesia Batam berjumlah 10 (sepuluh) BPR, yang terdiri dari: 7 BPR di Kota Batam, 2 BPR di Tanjung Pinang, 1 BPR di Tanjung Balai Karimun. Adapun BPR yang beroperasi di Kota Batam adalah: PT. BPR Dana Nusantara, PT. BPR Bareleng Mandiri, PT. BPR Pundi Masyarakat, PT. BPR Kapital Batam, PT. BPR Artha Prima Sejahtera, PT. BPR Sejahtera Batam dan PT. BPR Banda Raya. Sedangkan 1 PD.BPR Karimun berlokasi di Kecamatan Moro - Kabupaten Karimun, serta 2 BPR di Tanjung Pinang yaitu: PT. BPR Duta Kepri, dan PT. BPR Dana Bintang Sejahtera. Hingga saat ini, di wilayah Bank Indonesia Batam belum terdapat BPR yang beroperasi dengan sistem syariah. Data keuangan BPR di wilayah kerja KBI Batam terdapat di tabel 3.11

Tabel 3.11
Perkembangan Data Keuangan BPR di Wilayah Kerja KBI Batam
(dalam miliar rupiah)

Keterangan	2004		2005				Pert q-t-q	Pert y-o-y
	Tw.3	Tw.4	Tw.1	Tw.2	Tw.3	Tw.4		
Total Asset	92,656	115,427	129,728	164,954	203,213	243,143	19,65%	110,65%
DPK	73,614	91,918	108,351	134,571	174,307	204,362	17,24%	122,33%
- Tabungan	8,201	9,842	13,398	16,229	14,758	18,075	22,48%	83,65%

PERKEMBANGAN MONETER, PERBANKAN DAN SISTEM PEMBAYARAN

Keterangan	2004		2005				Pert	Pert
	Tw.3	Tw.4	Tw.1	Tw.2	Tw.3	Tw.4	q-t-q	y-o-y
-	65,413	82,076	95,880	118,342	159,548	186,287	16,76%	126,97%
Deposito	51,353	60,948	72,408	85,140	100,312	118,456	18,09%	94,36%
Kredit	69,76%	66,31%	66,83%	63,27%	57,55%	57,96%	0,41%	-8,35%
LDR								

Sumber : Bank Indonesia

Berdasarkan data pada tabel 3.11, perkembangan kinerja BPR di wilayah kerja KBI Batam selama tahun 2005 terus mengalami peningkatan hampir di seluruh indikator perbankan, baik total asset, DPK dan kredit yang diberikan. Selama triwulan IV-2005 DPK mengalami peningkatan 17,24% (q-t-q) dibandingkan dengan posisi pada triwulan III-2005, dimana simpanan dalam bentuk tabungan meningkat sebesar 22,48% dari Rp 14,76 miliar pada triwulan III-2005 menjadi Rp 18,18 miliar pada triwulan IV-2005. Sedangkan simpanan masyarakat dalam bentuk deposito meningkat sebesar 16,76% dari Rp 159,55 milyar pada triwulan III-2005 menjadi Rp 186,29 miliar pada triwulan IV-2005.

Jumlah kredit yang telah disalurkan selama triwulan IV-2005 meningkat sebesar 18,09% dari sebesar Rp. 100,312 miliar (Tw III-2005) menjadi Rp.118,456 miliar pada triwulan IV-2005. Sementara itu, jumlah dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun sebesar Rp. 204,362 miliar meningkat sebesar 17,24% dari sebesar Rp.174,307 miliar. namun demikian, tingkat LDR meningkat dari 57,55% pada triwulan III-2005 menjadi 57,96% pada triwulan IV-2005.

Secara umum, kualitas kredit yang diberikan secara nominal secara triwulanan menunjukkan peningkatan yang tercermin pada penurunan tingkat LDR pada triwulan IV-2005 terhadap triwulan III-2005. Untuk data penyaluran kredit dan kualitasnya dapat dilihat pada tabel 3.12

Tabel 3.12
Perkembangan Kredit yang Diberikan BPR dan Kualitasnya

(dalam juta rupiah)

Keterangan	2004		2005				Pert
	Tw.3	Tw.4	Tw.1	Tw.2	Tw.3	Tw.4	(qtq)
Kredit Kolektibilitas Bdskn	51.353	60.948	72.408	85.140	100.312	118.456	18,09
Lancar	51.176	60.800	72.320	84.664	99.919	117.796	17,89

PERKEMBANGAN MONETER, PERBANKAN DAN SISTEM PEMBAYARAN

Keterangan	2004		2005				Pert (qtq)
	Tw.3	Tw.4	Tw.1	Tw.2	Tw.3	Tw.4	
Kurang Lancar	155	126	40	451	303	484	59,74
Diragukan	-	-	16	-	28	0	-100
Macet	22	22	32	25	62	176	183,87
NPL (Nominal)	177	148	88	476	393	660	67,94
NPL (%)	0,34%	0,24%	0,12%	0,56%	0,39%	0,56%	0,17%

Sumber : Bank Indonesia

Dalam rangka pengembangan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia BPR terutama pengurus BPR maka Bank Indonesia telah menerapkan Program Sertifikasi Profesional untuk pengurus BPR dengan target sampai dengan 31 Desember 2006 minimal 1 direktur setiap BPR telah memiliki sertifikat, sedangkan pada 31 Desember 2008 ditargetkan seluruh direktur BPR sudah mendapatkan sertifikat.

4. Sistem Pembayaran

Kebijakan yang ditempuh Bank Indonesia dalam sistem pembayaran tunai diarahkan pada upaya untuk memenuhi kebutuhan uang kartal di masyarakat dalam jumlah nominal yang cukup, jenis pecahan yang sesuai, tepat waktu dan dalam kondisi yang layak edar. Sedangkan kebijakan untuk sektor pembayaran non tunai diarahkan pada upaya menciptakan sistem pembayaran yang efektif, efisien, aman dan handal.

4.1 Aliran Uang Kartal (*Outflow/Inflow*)

Selama triwulan laporan, aliran uang kartal yang masuk (*inflow*) ke KBI Batam mengalami peningkatan sebesar Rp. 290,32 miliar atau 58,14% (q-t-q) dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, sementara pergerakan uang kartal yang keluar (*outflow*) dari KBI Batam meningkat sebesar Rp. 221,11 miliar atau 21,81% dibandingkan triwulan sebelumnya. Secara keseluruhan, selama triwulan laporan, KBI Batam mengalami *net outflow* sebesar Rp. 445,26 miliar. Peningkatan *inflow* dan *outflow* pada triwulan IV-2005 didorong oleh meningkatnya konsumsi masyarakat dalam menghadapi Hari Raya Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru.

PERKEMBANGAN MONETER, PERBANKAN DAN SISTEM PEMBAYARAN

Data pergerakan *inflow* dan *outflow* uang kartal di wilayah kerja KBI Batam dapat dilihat pada tabel 3.13

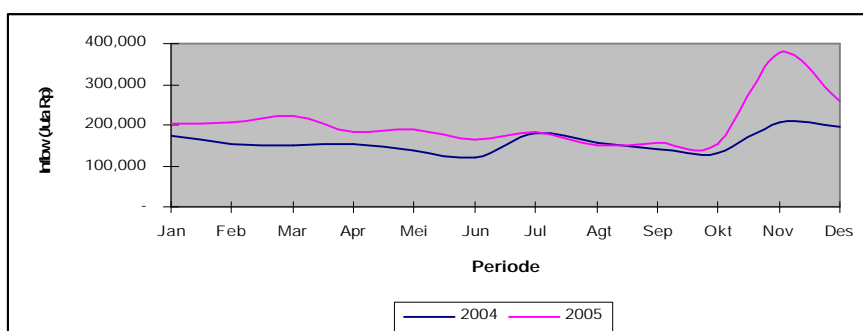
Tabel 3.13
Perkembangan Inflow dan Outflow Uang Kartal
Di Wilayah Kerja Bank Indonesia Batam

Periode	Inflow		Outflow		Net flow	
	(Juta Rp)	Pertm. %	(Juta Rp)	Pertm. %	Inflow	Outflow
Triwulan I-2003	480.659	50,99	475.306	- 44,26	5.353	-
Triwulan II-2003	348.809	-27,43	546.263	14,93	-	197.454
Triwulan III-2003	361.071	3,52	639.651	17,10	-	278.580
Triwulan IV-2003	434.727	20,40	1.033.531	61,58	-	598.804
Triwulan I-2004	482.275	10,94	581.277	-43,76	-	99.002
Triwulan II-2004	411.594	-14,66	891.148	53,31	-	479.554
Triwulan III-2004	484.406	17,69	838.255	-5,94	-	353.849
Triwulan IV-2004	539.763	11,43	1.339.736	59,82	-	800.000
Triwulan I-2005	640.230	18,61	926.990	-30,81	-	286.759
Triwulan II-2005	544.738	-14,92	999.526	7,82	-	454.788
Triwulan III-2005	499.380	-8,33	1.013.848	1,43	-	514.468
Triwulan IV-2005	789.704	58,14	1.234.962	21,81	-	445.258

Sumber: Kantor Bank Indonesia Batam

Aliran masuk uang kartal (*inflow*) ke Kantor Bank Indonesia Batam pada triwulan IV-2005 (q-t-q) meningkat sebesar Rp 290,32 miliar (58,14%) terhadap triwulan III-2005, dan secara tahunan meningkat sebesar Rp 249,94 miliar (46,31%). Pergerakan aliran uang masuk ke KBI Batam dapat dilihat pada grafik 3.7

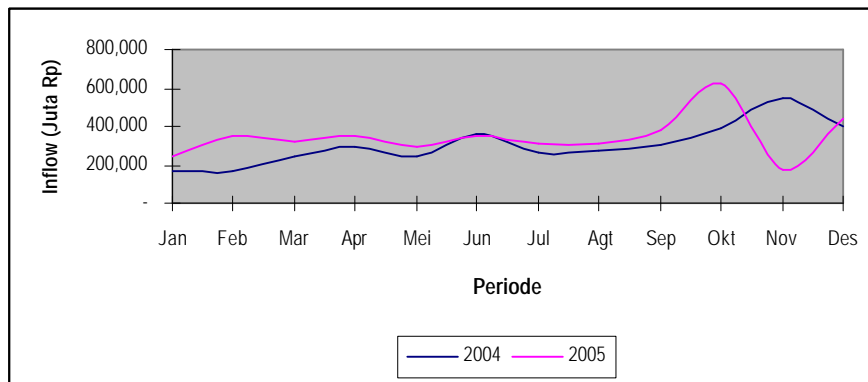
Grafik 3.7
Pergerakan Inflow Uang Kartal



Sumber : Bank Indonesia

Sementara itu, aliran keluar uang kartal (*outflow*) dari Kantor Bank Indonesia Batam pada triwulan IV-2005 secara triwulanan meningkat sebesar Rp. 221,11 miliar (21,81%) dan secara tahunan menurun sebesar Rp. 104,77 miliar (-7,82%). Secara keseluruhan, terjadi *net outflow* sebesar Rp. 445,26 miliar, menurun apabila dibandingkan *net outflow* pada triwulan III-2005 yang tercatat sebesar Rp. 514,47 miliar.

Grafik 3.8
Pergerakan Outflow Uang Kartal



Sumber : Bank Indonesia

Pada grafik 3.7 dan grafik 3.8 terlihat bahwa terdapat sedikit peningkatan pada aliran uang kartal masuk ke KBI Batam, sedangkan aliran uang kartal keluar dari KBI Batam mengalami penurunan.

4.2 Pemberian Tanda Tidak Berharga (PTTB)

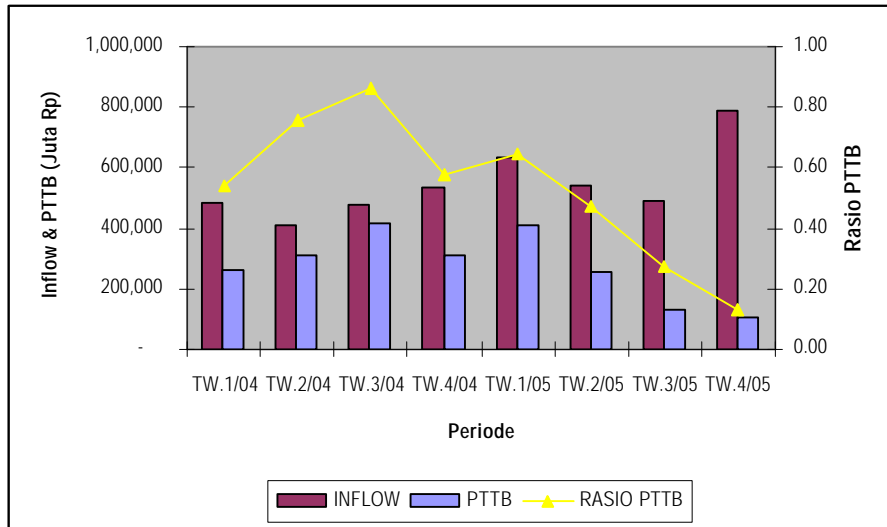
Pemberian Tanda Tidak Berharga (PTTB) oleh Bank Indonesia bertujuan untuk penyediaan uang layak edar (*clean money policy*), yang dilakukan dengan cara memusnahkan uang yang tidak layak edar dan menggantinya dengan uang yang layak edar. Disamping itu, Bank Indonesia juga memberikan pelayanan kepada perbankan dan masyarakat untuk kegiatan setoran, penarikan dan penukaran untuk pecahan besar ke pecahan kecil serta untuk uang rupiah lusuh.

Selama triwulan IV-2005, PTTB di KBI Batam menurun - 47,19% (q-t-q) terhadap triwulan II-2005 yaitu dari Rp.252,295

PERKEMBANGAN MONETER, PERBANKAN DAN SISTEM PEMBAYARAN

miliar menjadi Rp.133,243 miliar. Penurunan jumlah PTTB ini sejalan dengan berkurangnya jumlah aliran uang kartal yang masuk ke KBI Batam (*inflow*) selama triwulan III-2005.

Grafik 3.9
Perkembangan Inflow, PTTB dan Rasio PTTB



Sumber : Bank Indonesia

4.3 Penemuan Uang Rupiah Palsu

Selama triwulan IV-2005 terdapat penurunan jumlah uang palsu yang ditemukan dan dilaporkan ke KBI Batam, yaitu sebanyak 18 lembar dengan nilai Rp. 1.305.000,00 atau menurun jika dibandingkan triwulan III-2005 yang tercatat sebanyak 14 lembar dengan nilai nominal sebesar Rp. 985.000,00

Tabel 3.14
Jumlah Uang Palsu Yang Ditemukan

(dalam lembar)

pecahan mata uang (nominal)	2004				2005				Jumlah
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	
Rp 100.000		9	6	8	8	9	8	11	36
Rp 50.000		5	4	30	51	16	3	3	73
Rp 20.000		1	1	4	2	4	1	2	9
Rp 10.000		0	0	1	1	3	1	1	6
Rp 5.000		0	1	0	0	0	1	1	2

Sumber: Bank Indonesia

PERKEMBANGAN MONETER, PERBANKAN DAN SISTEM PEMBAYARAN

Jumlah uang palsu yang dilaporkan/diterima oleh KBI Batam selama triwulan IV-2005 sebanyak 11 lembar pecahan Rp 100.000 ; 3 lembar pecahan Rp50.000 ; 2 lembar pecahan Rp20.000 ; 1 lembar pecahan Rp10.000; dan 1 lembar pecahan Rp 5.000.

Jumlah pecahan uang palsu yang ditemukan dan dilaporkan di wilayah kerja KBI Batam terbilang tidak terlalu besar baik dalam nominal maupun lembar. Penemuan jumlah pecahan uang palsu tersebut tidak signifikan jika dibandingkan jumlah uang yang diedarkan oleh Bank Indonesia Batam, namun perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan pengetahuan kepada masyarakat di beberapa Kota/Kabupaten Propinsi Kepulauan Riau melalui penyuluhan atau sosialisasi tentang ciri-ciri keaslian uang rupiah yang dilaksanakan secara rutin setiap tahun dimana pada pelaksanaannya disambut antusias oleh masyarakat. Oleh karena itu, setiap tahun Bank Indonesia terus berupaya untuk melakukan sosialisasi keaslian uang rupiah kepada masyarakat sehingga diharapkan akan dapat meminimalisasi jumlah uang palsu yang beredar di masyarakat.

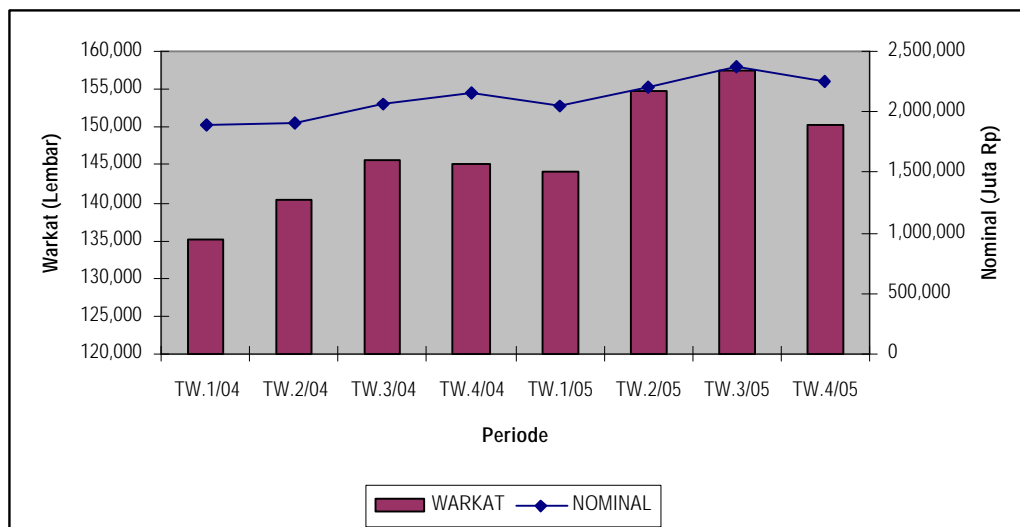
4.4 Transaksi Keuangan Non-Tunai (Kliring Lokal)

Transaksi keuangan melalui sistem kliring di KBI Batam pada triwulan IV-2005 mengalami peningkatan dalam jumlah nominal dan jumlah warkat. Di wilayah kerja KBI Batam terdapat 3 wilayah kliring lokal yaitu di KBI Batam untuk wilayah Kota Batam, PT. Bank Mandiri untuk wilayah Tanjung Pinang, dan PT. BNI untuk wilayah Tanjung Balai Karimun.

Perputaran kliring di wilayah kerja KBI Batam pada triwulan IV-2005 cenderung meningkat dari jumlah nominal dan jumlah warkat masing-masing 7,43% dan 1,71% terhadap triwulan II-2005, dimana jumlah warkat yang dikliringkan pada triwulan laporan sebanyak 157.535 warkat dengan nominal sebesar Rp2,372 triliun.

PERKEMBANGAN MONETER, PERBANKAN DAN SISTEM PEMBAYARAN

Grafik 3.10
Perkembangan Transaksi Kliring di Wilker KBI Batam



Sumber : Bank Indonesia

Sementara itu, untuk penolakan Cek/BG kosong selama triwulan IV-2005 meningkat sebanyak 3,86% dan secara nominal sebesar 1,28% dibandingkan jumlah warkat yang ditolak pada triwulan III-2005. Penolakan Cek/BG Kosong pada triwulan laporan mencapai 1.697 lembar warkat dengan nominal sebesar Rp 32,657 miliar.

Tabel 3.15
Perputaran Kliring dan Cek/BG Kosong

Keterangan	2004				2005			
	Tw.1	Tw.2	Tw.3	Tw.4	Tw.1	Tw.2	Tw.3	Tw.4
Perputaran Kliring								
- Lembar	136.461	140.276	145.620	145.176	144.005	154.879	157.535	150.400
- Nominal (miliar Rp)	1.888	1.914	2.063	2.151	2.054	2.208	2.372	2.259
Rata-Rata Harian Perputaran Kliring								
- Lembar	2.290	2.300	2,275	2,268	2.400	2.539	2.424	2.593
- Nominal (Miliar Rp)	32,00	31,38	32,23	33,62	34,23	36,20	36,49	38.945
Penolakan Cek/BG Kosong								
- Lembar	1.063	1.059	977	1,006	860	1.624	1.634	1.697
- Nominal (miliar Rp)	19,651	18,894	17,658	27,147	23,780	33,536	32,245	32.657

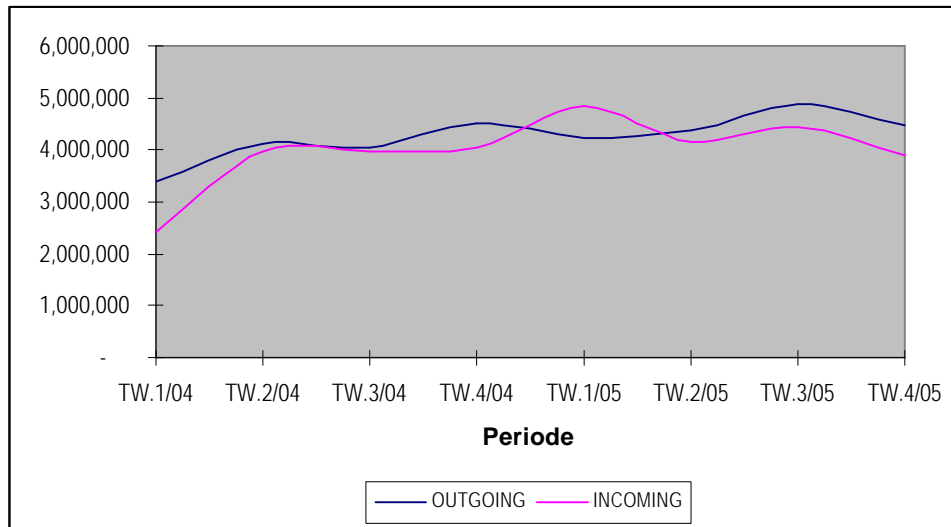
Sumber : Bank Indonesia

4.5 Transaksi BI-RTGS (Bank Indonesia - Real Time Gross Settlement)

Transaksi masyarakat melalui sarana *Bank Indonesia - Real Time Gross Settlement* (RTGS) di Kantor Bank Indonesia Batam selama triwulan IV-2005 menurun pada transaksi *outgoing* sebesar -8,01% yaitu dari Rp 4,876 triliun pada triwulan III-2005 menjadi Rp 4,488 triliun. Demikian juga untuk transaksi *incoming* menurun sebesar -12,89% yaitu dari Rp 4,469 triliun pada triwulan III-2005 menjadi Rp 3,886 triliun pada triwulan IV-2005.

Dari jumlah transaksi pada wilayah KBI Batam (*outgoing*) pada triwulan IV-2005 menurun 609 transaksi atau -8,42%. Sedangkan transaksi *incoming* menurun sebanyak 1.057 transaksi atau 17,69%.

Grafik 3.11
Perkembangan Transaksi RTGS di Wilker KBI Batam



Bab 4

Kuangan Pemerintah Daerah Periode Tahun 2005

4.1 APBD Provinsi Kepulauan Riau

Jumlah anggaran yang ditetapkan oleh suatu Pemerintah Daerah menjadi salah satu faktor pendukung utama terhadap kemajuan dan perkembangan suatu daerah, demikian pula dengan Provinsi Kepulauan Riau yang terdiri dari 6 Kota/Kabupaten yaitu: Kota Batam, Kota Tanjung Pinang, Kabupaten Kepulauan Riau, Kabupaten Tanjung Balai Karimun, Kabupaten Natuna dan Kabupaten Lingga.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah, jumlah pendapatan Provinsi Kepulauan Riau sampai dengan bulan September 2005 sebesar Rp 299 miliar atau sebesar 91,45% dari jumlah yang ditargetkan.

Tabel 4.1

Rekapitulasi Realisasi Penerimaan Provinsi Kepulauan Riau

No	Jenis Penerimaan	Target Penerimaan Th. 2005	Realisasi Penerimaan s/d September 2005	% Pencapaian Target
	PENDAPATAN	327.347.000.000	299.352.112.110,74	91,45
A	PENDAPATAN ASLI DAERAH	164.015.000.000	156.487.075.867,74	95,41
I	Pajak Daerah	163.305.000.000	150.291.268.166,92	92,03
II	Retribusi Daerah	280.000.000	223.057.154,00	79,66
III	Lain-Lain PAD yang Sah	430.000.000	5.972.750.546,82	1389,01
B	DANA PERIMBANGAN	139.732.000.000	113.773.496.243,00	81,42
1	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	103.832.000.000	94.301.249.243,00	90,82
2	Dana Alokasi Umum	25.900.000.000	19.472.247.000	75,18
3	Dana Alokasi Khusus	10.000.000.000	-	0,00
C	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	23.600.000.000	29.091.540.000	123,27

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah - Provinsi Kepulauan Riau

Jumlah pendapatan Provinsi Kepulauan Riau sebagian besar disumbangkan oleh Pendapatan Asli Daerah sebesar 52,28%, dana perimbangan sebesar 38%, dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar 9,72%. Jumlah pajak daerah yang diperoleh sebagian besar disumbangkan oleh Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp 71.136.868.493, sementara jumlah lain-lain PAD yang sah

sebagian besar disumbangkan oleh Jasa Giro Bank Riau dan Bank Mandiri sebesar Rp 5.895.000.146,82.

4.2 APBD Kota Batam

Target APBD Kota Batam 2005 terdiri dari pos pendapatan sebesar Rp356,100 miliar dan pos pembiayaan sebesar Rp 60,046 miliar. Target APBD Kota Batam tahun 2005 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2004, dimana pada tahun 2004 total pembiayaan sebesar Rp 68,220 miliar sementara total pendapatan sebesar Rp 382,769 miliar.

Data realisasi APBD yang disajikan pada laporan ini baru meliputi data realisasi penerimaan Kota Batam, Kota Tanjung Pinang, dan Kabupaten Tanjung Balai Karimun, sedangkan data APBD untuk Kabupaten Kepulauan Riau, Kabupaten Natuna, dan Kabupaten Lingga tidak dapat disajikan karena keterbatasan data.

Realisasi penerimaan pendapatan Kota Batam sampai dengan triwulan IV-2005 mencapai Rp. 343,490 miliar dan telah terealisasi sebesar 78,59% dari target pendapatan Kota Batam 2005 yang telah ditetapkan. Penerimaan tersebut berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp47,355 miliar (78,86% dari target 2005) dan Dana Perimbangan sebesar Rp191,236 miliar (75,31% dari target 2005). Pos retribusi daerah memberikan sumbangan terbesar pada total realisasi penerimaan yang mencapai Rp14,394 miliar atau 86,17% dari total Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sebagian besar realisasi penerimaan daerah yang disumbangkan dari pos pajak daerah dimana sub pos pajak penerangan jalan memiliki jumlah terbesar mencapai Rp8,961 miliar (89,61% dari target APBD 2005), namun perolehan daerah yang berasal dari pajak reklame memiliki jumlah persentase terbesar terhadap target APBD 2005 yaitu sebesar Rp. 2,195 miliar (115,57% dari target APBD 2005).

Tabel 4.1
Realisasi Penerimaan Pendapatan Kota Batam Periode 2005

JENIS PUNGUTAN	REALISASI 2005		
	TARGET APBD (APBD Perubahan)	REALISASI s.d Sept	%
A. Pendapatan Asli Daerah (PAD)			
I. Pajak Daerah			
1. Pajak Hotel	12.500.000.000	8.659.401.558	69,28
2. Pajak Restoran	6.500.000.000	5.569.557.272	85,69
3. Pajak Hiburan	3.700.000.000	2.518.661.460	68,07
4. Pajak Reklame	1.900.000.000	2.195.810.805	115,57
5. Pajak Penerangan Jalan	10.000.000.000	8.961.274.230	89,61
6. Pajak Bahan Galian	1.300.000.000	1.211.565.676	93,20
7. Pajak Parkir	185.000.000	133.241.390	72,02
Jumlah Pajak I	36.085.000.000	29.249.512.391	81,06
II. Retribusi Daerah			
1. Retribusi Pelayanan Kesehatan	1.210.000.000	1.270.691.400	105,02
2. Retribusi Persampahan	5.500.000.000	3.887.002.800	70,67
3. Retribusi Biaya Cetak KTP	1.500.000.000	1.285.470.000	85,70
4. Ganti Biaya Cetak Akta Catatan Sipil	325.000.000	356.275.000	109,62
5. Retribusi Parkir di pinggir jalan umum	660.000.000	441.000.000	66,82
6. Pelayanan pasar	320.000.000	205.908.000	64,35
7. Pengujian Kendaraan Bermotor	1.100.000.000	1.033.419.000	93,95
8. IMB	4.300.000.000	4.325.528.411	100,59
10. Izin Trayek	250.000.000	256.673.500	102,67
11. Penetapan jenis dan sifat kendaraan	15.000.000	3.450.000	23,00
12. Izin Penyelenggaraan Reklame	375.000.000	410.715.250	109,52
13. Siup	700.000.000	583.484.000	83,35
14. Izin Parawisata	450.000.000	334.886.300	74,42
Jumlah Retribusi	16.705.000.000	14.394.503.661	86,17
1. Deviden bagian laba BPD Riau	482.952.114	482.952.114	100,00
Jumlah laba perusahaan milik daerah	482.952.114	482.952.114	100,00
1. Jasa Giro	1.500.000.000	1.164.846.431	77,66
2. Sewa Kios Pasar Induk	500.000.000	12.530.000	2,51
3. Lain-lain penerimaan	4.773.698.500	2.050.796.118	42,96
Jmlh Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yg sah	6.773.698.500	3.228.172.549	47,66
PAD	60.046.650.614	47.355.140.715	78,86
C. Dana Perimbangan			
I. Bagi Hasil Pajak	85.515.000.000	72.284.824.024	84,53
II. Bagi Hasil Bukan Pajak	12.600.000.000	9.158.530.759	72,69
III. Dana Alokasi Umum	125.000.000.000	94.373.249.995	75,50
IV. Bagi Hasil Pajak Propinsi	30.827.000.000	15.420.059.886	50,02
D. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	3.450.000.000	3.450.000.000	100,00
JML PENDAPATAN KOTA BATAM	356.100.856.306	279.842.811.189	78,59

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Batam

Untuk target anggaran pendapatan dan belanja Kota Batam periode tahun 2004 - 2005 dapat dilihat pada tabel 4.2

Tabel 4.2
TARGET ANGGARAN PENDAPATAN KOTA BATAM TAHUN 2004 - 2005

URAIAN	APBD	Porsi	APBD (APBD Perubahan)	Porsi thd Pembiayaan	Perbhn
	2004	2004 (%)	2005	2005(%)	2005/04 (%)
A. PEMBIAYAAN	68.220.253.877	17,82	38.662.205.692	10,86	-43,33
Sisa anggaran tahun lalu	66.620.253.877	17,40	37.162.205.692	10,44	-44,22
Pengembalian pokok pinj. Dana bergulir	1.600.000.000	0,42	1.500.000.000	0,42	-6,25
B. PENDAPATAN					
Pendapatan Asli Daerah	59.550.500.000	15,56	60.046.650.614	16,86	0,83
Pajak Daerah	27.522.500.000	7,19	36.085.000.000	10,13	31,11
Retribusi Daerah	15.628.000.000	4,08	16.705.000.000	4,69	6,89
Hasil Kekayaan Milik Daerah	1.000.000.000	0,26	482.952.114	0,14	-51,70
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	15.400.000.000	4,02	6.773.698.500	1,90	-56,01
Dana Perimbangan	250.648.992.705	65,48	253.942.000.000	71,31	1,31
Bagi Hasil Pajak	96.648.992.705	25,25	85.515.000.000	24,01	-11,52
Bagi Hasil Bukan Pajak	16.800.000.000	4,39	12.600.000.000	3,54	-25,00
Dana Alokasi Umum	104.200.000.000	27,22	125.000.000.000	35,10	19,96
Bagi Hasil Pajak & Bantuan Keu dr Prop	33.000.000.000	8,62	30.827.000.000	8,66	-6,58
Lain-lain Pendapatan Yang Sah	4.350.000.000	1,14	3.450.000.000	0,97	-20,69
Jumlah Pendapatan	382.769.746.582	100	356.100.856.306	100,00	-6,97

Sumber : Bagian Keuangan Pemerintah Kota Batam

Target APBD yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Batam pada tahun 2005 mengalami penurunan untuk pos pembiayaan dan pos pendapatan yang mencapai -6,97%. Pada pos pembiayaan, penurunan terbesar terdapat pada sub pos sisa anggaran tahun lalu dimana pada tahun 2004 sebesar Rp 66,620 miliar dan tahun 2005 sebesar Rp 37,162 miliar. Sementara itu, pada pos pendapatan, sub pos lain-lain pendapatan yang sah mengalami penurunan sebesar -20,69% yaitu dari Rp 4,350 miliar (tahun 2004) menjadi Rp 3,450 miliar (tahun 2005).

4.3 APBD Kab. Tanjung Balai Karimun

Kabupaten Tanjung Balai Karimun awalnya merupakan sebuah kecamatan yang berada di bawah Kabupaten Kepulauan Riau. Namun setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 53 tahun 1999 maka Kabupaten Kepulauan Riau dimekarkan menjadi 3 Kabupaten, yaitu: Kabupaten Kepulauan Riau, Kabupaten Karimun, dan Kabupaten

Natuna. Saat ini Karimun telah menjadi sebuah kabupaten otonom yang merupakan gabungan dari 8 kecamatan.

Tabel 4.3
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)
KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2005

URAIAN	ANGGARAN TAHUN 2005	REALISASI ANGGARAN s.d Tw.iii/05
PENDAPATAN	205.075.500.000	164.284.865.074,90
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	29.407.000.000	27.241.037.541,90
Pajak Daerah	22.895.000.000	18.733.323.405
Retribusi Daerah	2.232.000.000	1.656.283.982
Hasil Perusahaan Milik Daerah yg dipisahkan	830.000.000	470.255.223
Lain-lain PAD yang sah	3.450.000.000	6.381.174.931,90
Bagian Dana Perimbangan	172.797.500.000	134.133.475.528
Lain-lain Penerimaan yg sah	2.871.000.000	2.910.352.005
BELANJA	232.815.083.749	160.782.769.484,90
Belanja Aparatur Daerah	71.803.237.406	52.237.491.321
Belanja Pelayanan Publik	161.011.846.343	108.545.278.163,90

Sumber : Sekretariat Daerah-Pemerintah Kabupaten Karimun

Target total anggaran pos pendapatan Kabupaten Karimun tahun 2005 sebesar Rp 205,075 miliar atau sebesar 57,59% dari total pendapatan Kota Batam. Realisasi pendapatan sampai dengan triwulan III-2005 mencapai Rp 164,284 miliar atau sebesar 80,11% dari target 2005. Sementara itu, pos belanja Kabupaten Karimun sebesar Rp 232,815 miliar dimana jumlah yang telah direalisasikan mencapai Rp 160,782 miliar atau sebesar 69,06% dari target 2005.

Sebagai sebuah kabupaten baru, Karimun berusaha melakukan berbagai pembangunan yang lebih merata dan menyeluruh ke berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dilihat dari total PDRB yang mencapai Rp 1,507 triliun pada tahun 2003 (atas dasar harga berlaku) dan Rp 427,811 miliar (atas dasar harga konstan 1993) dimana kontribusi PDRB Kabupaten Karimun sebesar 5,78% untuk tahun 2003 (atas dasar harga berlaku) dan sebesar 5,49% (atas dasar harga konstan). Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan ekonomi Kabupaten Karimun terhadap pembentukan PDRB secara keseluruhan dalam Provinsi Kepulauan Riau cukup besar.

Pada saat terbentuk, Kabupaten Karimun hanya terdiri dari 3 kecamatan. Namun sejalan dengan semakin meningkatnya pembangunan di berbagai wilayah di Kabupaten Karimun, maka pemerintah daerah menetapkan 5 kecamatan baru. Dengan demikian saat ini telah berdiri 8 kecamatan baru yaitu Kecamatan Moro, Kecamatan Kundur, Kecamatan Karimun, Kecamatan Kundur Utara, Kecamatan Kundur Barat, Kecamatan Buru, Kecamatan Meral, dan Kecamatan Tebing. Pemerintah daerah berharap dengan adanya berbagai pemekaran di pemerintahan, pembangunan akan lebih cepat dan maju secara menyeluruh.

4.4 APBD Kota Tanjung Pinang

Perhitungan APBD Kota Tanjung Pinang adalah perhitungan atas segala pelaksanaan kegiatan yang telah dianggarkan dalam tahun anggaran baik yang berkaitan dengan penerimaan daerah maupun pengeluaran kas. Kota Tanjung Pinang pada mulanya adalah sebuah kota yang berada di Teluk Bintan. Kehidupan masyarakatnya memiliki ciri khusus masyarakat Melayu Kepulauan dengan beragam penduduk yang cukup heterogen. Kemajemukan masyarakat Kota Tanjung Pinang tersebut semakin menjadikan tantangan untuk lebih membuat daerah tersebut maju disamping letak geografis Kota Tanjung Pinang yang cukup strategis menjadikan Kota ini sebagai tempat pertemuan pedagang dari berbagai daerah dengan para pembeli, sehingga dalam waktu yang sangat cepat menjadikan Kota Tanjung Pinang sebagai pusat perdagangan dengan berbagai aktifitas perekonomian.

Dikutip dari laporan pertanggungjawaban Walikota Tanjung Pinang tahun anggaran 2003 disebutkan bahwa pada pelaksanaan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dimana sebagian besar kewenangan dan urusan pemerintahan berada pada Pemerintahan Kabupaten dan Kota, maka Pemerintah Kota Tanjung Pinang telah menyiapkan suatu rencana strategis Kota Tanjung Pinang tahun 2003 - 2007 sebagaimana telah diformalkan dalam

Peraturan Daerah Kota Tanjung Pinang No. 11 Tahun 2002. Dalam Renstra ini telah dirumuskan visi pembangunan Kota Tanjung Pinang yaitu "Terwujudnya Kota Tanjung Pinang sebagai pusat perdagangan dan jasa industri, pariwisata serta pusat budaya melayu dalam lingkungan masyarakat yang agamis sejahtera lahir dan batin pada tahun 2020".

Tabel 4.4
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)
KOTA TANJUNG PINANG - TAHUN 2005

NO	URAIAN	REALISASI PENERIMAAN S.D TW.II/05
I	PAD	Rp. 12.599.667.435
	- Pos Pajak Daerah	Rp. 4.256.956.923
	- Pos Retribusi Daerah	Rp. 3.397.817.622
	- Bagian Laba Usaha Daerah	Rp. 9.888.449
	- Pos Lain Pendapatan Asli Daerah	Rp. 647.825.573
	- Lain lain Pendapatan yang Sah	Rp. 23.757.418
	- Hasil Penjualan Aset Daerah	Rp. 253.800
	- Sisa Kas / Sisa UUDP	Rp. 4.263.167.650
II	BAGIAN DANA PERIMBANGAN	Rp. 65.493.308.027
	- Pos Bagi Hasil Pajak	Rp. 4.290.147.317
	- Pos Bagi Hasil Bukan Pajak / SDA	Rp. 2.686.077.610
	- Dana Alokasi Umum	Rp. 58.517.083.100
	TOTAL PENERIMAAN	Rp. 78.092.975.462
III	REALISASI PENGELUARAN	Rp. 62.381.351.103

Sumber : Sekretariat Daerah-Pemerintah Kota Tanjung Pinang

Kebijakan dalam penyusunan anggaran disesuaikan dengan kondisi daerah yaitu meliputi kebijakan anggaran pendapatan, kebijakan anggaran belanja rutin dan kebijakan anggaran pembangunan. Sampai saat ini, anggaran pendapatan dan belanja Kota Tanjung Pinang masih bertumpu pada Dana Perimbangan yang pengalokasiannya sangat bergantung kepada keputusan dari Pemerintah Pusat.

4.5 RAPBD Provinsi Kepulauan Riau Periode 2005

Untuk nilai Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Kepulauan Riau tahun 2005 ditetapkan sebesar Rp403,763 miliar dan RAPD Kota Batam sebesar Rp337,758

miliar. Dari total RAPBD Provinsi Kepri, sebesar Rp242,6 miliar (60,08%) adalah anggaran untuk belanja aparatur daerah, anggaran belanja pelayanan publik sebesar Rp59,505 miliar (14,74%) dan lebih kecil dari nilai belanja bagi hasil yang mencapai Rp63,747 miliar.

Data RAPBD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2005 terdapat pada tabel 4.5

Tabel 4.5
RAPBD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2005

ANGGARAN BELANJA:	
anggaran belanja aparatur daerah	Rp 242,6 miliar
belanja pelayanan publik	Rp 59,5 miliar
belanja bagi hasil	rp 63,7 miliar
belanja bantuan keuangan	rp 35,9 miliar
belanja tidak terduga	rp 2 miliar
TOTAL	RP 403,7 MILIAR
ANGGARAN PENDAPATAN:	
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	RP 164,015 MILIAR
DANA PERIMBANGAN	RP 139,732 MILIAR
PENDAPATAN LAIN-LAIN YANG SAH	RP 23 MILIAR
TOTAL PENERIMAAN TAHUN 2005	RP 327,347 MILIAR

Sumber : Gubernur Kepulauan Riau

Berdasarkan keterangan dari Gubernur Provinsi Kepri - Drs. H. Ismeth Abdullah yang dikutip di harian Batam Pos - 29 Desember 2004 disebutkan bahwa nilai belanja aparatur yang memiliki porsi cukup besar terhadap total RAPBD Provinsi Kepri 2005 dikarenakan Provinsi Kepri merupakan provinsi baru sehingga memerlukan pembenahan di berbagai bidang. Oleh karena itu, anggaran belanja aparatur daerah tersebut akan dialokasikan bagi pos belanja administrasi umum sebesar Rp 179,041 miliar, biaya operasional dan pemeliharaan sebesar Rp 36,575 miliar serta pos modal sebesar Rp 26,994 miliar. Sementara itu untuk program kesehatan terdapat dana tambahan sebesar Rp74 miliar yang berasal dari pemerintah pusat, yang meliputi 2 (dua) rumah sakit lapangan senilai Rp50 miliar untuk daerah Natuna dan Lingga, dan

1 (satu) rumah sakit permanen di Tanjunguban bernilai Rp24 miliar dan direncanakan sebagai rumah sakit Provinsi Kepri.

Untuk sektor penerimaan tahun 2005 yang mencapai Rp327,347 miliar bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp164,015 miliar, dana perimbangan Rp139,732 miliar dan pendapatan lain-lain yang sah sebesar Rp23 miliar. Dari komponen PAD ini sebagian besarnya adalah pajak daerah yaitu 99% masih bertumpu pada pajak kendaraan bermotor yang mencapai 62,3 miliar. Selain itu dipertimbangkan juga untuk mencari upaya lain menambah pendapatan daerah antara lain dengan meningkatkan pajak lainnya serta retribusi dari berbagai kegiatan perekonomian di masyarakat, seperti angkutan ro-ro Batam Tanjunguban yang sedang dipersiapkan pengoperasiannya, termasuk menggali potensi kelautan, perikanan serta pariwisata.

RAPBD Kota Batam disahkan menjadi APBD Kota Batam pada rapat paripurna DPRD Kota Batam yang mencapai Rp337,758 miliar. Dari total APBD Kota Batam 2005 tersebut, sebesar Rp67,552 miliar (20%) adalah untuk anggaran pendidikan, sedangkan tunjangan perumahan DPRD Batam diturunkan sebesar Rp400 juta menjadi Rp2,8 miliar.

Bab 5

Prospek Perekonomian Daerah

Data indikator perekonomian Provinsi Kepulauan Riau dan Kota Batam sampai dengan triwulan laporan menunjukkan perlambatan pada beberapa perkembangan indikator perekonomian yang ditunjukkan antara lain pada pertumbuhan PDRB, laju inflasi, indikator perbankan, serta keuangan daerah. Di samping itu keputusan pemerintah yang memberikan kemudahan dan fasilitas khusus di bidang kepabeanan, fiskal, dan perdagangan untuk pelaku usaha dan investor di Pulau Batam, Bintan, dan Karimun diharapkan dapat memacu pergerakan roda perekonomian khususnya di Provinsi Kepulauan Riau sehingga akan memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian regional dan nasional.

A. Pertumbuhan Ekonomi

Prospek ekonomi makro pada triwulan IV-2005 diperkirakan akan mengalami perlambatan. Perlambatan pertumbuhan ini antara lain berdasarkan perkembangan data pertumbuhan ekonomi selama beberapa triwulan terakhir yang menunjukkan bahwa pertumbuhan perekonomian Provinsi Kepulauan Riau cenderung mengalami perlambatan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain dari sisi penawaran yaitu: melambatnya investasi, menurunnya persepsi bisnis, serta pengaruh melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap Valuta Asing demikian pula dari sisi permintaan.

Kondisi makro ekonomi regional di Provinsi Kepulauan Riau pada triwulan laporan mengalami perkembangan yang hampir sama dengan kondisi nasional. Penurunan perdagangan dunia, peningkatan suku bunga internasional sebagai dampak kebijakan moneter ketat yang ditempuh oleh beberapa bank sentral dunia, dan kenaikan harga BBM pada awal triwulan IV cukup memberikan pengaruh pada pertumbuhan ekonomi nasional.

Provinsi Kepulauan Riau sebagai daerah yang masih melakukan pembenahan di berbagai bidang, berusaha untuk terus meningkatkan pembangunan ekonomi daerahnya. Kota Batam yang

selama ini diarahkan menjadi Kota Industri masih berusaha untuk membuat kebijakan-kebijakan yang akan mendorong sektor industri. Penetapan kawasan *Bonded Zone Plus* (BZP) yang diberlakukan sejak 21 Juli 2005 merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan sektor industri dan investasi di Provinsi Kepulauan Riau.

Namun kebijakan tersebut juga harus didukung oleh variabel-variabel lain seperti: sektor ekonomi yang stabil, sektor politik dan keamanan yang mendukung, serta *cost of production* yang tidak memberatkan sektor usaha. Dengan mempertimbangkan masih besarnya tekanan pada inflasi, tingkat suku bunga, serta perlambatan pada pertumbuhan ekonomi, investasi, ekspor, serta konsumsi swasta, maka diperkirakan perkembangan perekonomian daerah pada triwulan IV-2005 masih akan mengalami perlambatan. Disamping itu, kebijakan Pemerintah untuk menaikkan harga BBM turut memberikan dampak pada usaha perbaikan perekonomian.

B. Prospek Laju Inflasi

Perkiraan tekanan inflasi regional hingga akhir tahun 2005 masih cukup tinggi. Bahkan secara nasional, berdasarkan Laporan Kebijakan moneter Triwulan III-2005 yang diterbitkan oleh Bank Indonesia disebutkan bahwa laju inflasi IHK pada akhir tahun diperkirakan mencapai sekitar 12% (yoy) atau jauh berada di atas sasaran inflasi yang ditetapkan Pemerintah yaitu sebesar $6\pm 1\%$. Tekanan inflasi tersebut dapat lebih besar lagi apabila dampak lanjutan kenaikan harga BBM terhadap biaya transportasi dan biaya lainnya tidak dapat terkendali. Beberapa faktor penyebab tingginya perkiraan laju inflasi IHK adalah kenaikan harga *administered* (BBM), ekspektasi inflasi masyarakat yang masih tinggi, serta kenaikan harga pada kelompok *volatile foods*.

Sementara itu, laju inflasi IHK regional diperkirakan masih akan mengalami tekanan pada triwulan IV-2005. Hal ini terutama dipengaruhi oleh kenaikan harga BBM yang berdampak pada kenaikan harga *volatile foods*, serta peningkatan ekspektasi inflasi masyarakat. Disamping itu, letak wilayah

Provinsi Kepulauan Riau yang berseberangan dengan negara Singapura dan Malaysia menyebabkan pengaruh nilai tukar rupiah terhadap valuta asing terutama SGD (*Singapore Dollar*), USD (*US Dollar*), dan MYR (*Malaysia Ringgit*) cukup mempengaruhi tingkat harga yang berlaku di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

C. Kinerja Perbankan

Perkembangan kinerja perbankan pada akhir tahun 2005 diperkirakan masih tetap stabil meskipun akan diikuti oleh meningkatnya risiko kredit. Arah kebijakan perbankan ke depan akan tetap konsisten menjaga daya tahan perbankan melalui upaya mendorong konsolidasi dan perbankan yang prudent sehingga eksistensinya dalam perekonomian tetap meningkat. Guna meminimalkan risiko-risiko usaha yang dihadapi, Bank Indonesia akan terus mengarahkan perbankan untuk membenahi tata kelola termasuk meningkatkan efektivitas manajemen risiko dan pengendalian internal.

Beberapa langkah yang akan diambil pada triwulan IV-2005 mencakup kegiatan monitoring terhadap rencana usaha 2005, memonitor kondisi likuiditas perbankan berkaitan dengan dampak penerapan GWM baru dan pendirian LPS, dan melanjutkan implementasi Arsitektur Perbankan Indonesia (API). Bank Indonesia juga akan terus melakukan kebijakan dalam rangka pengembangan BPR dengan tetap mengarahkan pada langkah-langkah pemberdayaan dan penguatan daya saing BPR.

Berdasarkan data indikator perbankan di wilayah kerja KBI Batam selama beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa sektor perbankan merupakan sektor yang cukup potensial untuk dikembangkan. Diperkirakan jumlah jaringan kantor di wilayah kerja akan terus meningkat terutama untuk Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Disamping itu, dengan berkembangnya perekonomian daerah Provinsi Kepulauan Riau yang merupakan daerah kepulauan maka diharapkan sektor perbankan akan turut memberikan kontribusi pada pembangunan di daerah Provinsi Kepulauan Riau.

**TABEL 1. PDRB PROVINSI KEPULAUAN RIAU ATAS DASAR HARGA KONSTAN 1993
MENURUT LAPANGAN USAHA 2004 - 2005 (JUTAAN RUPIAH)**

LAPANGAN USAHA	2004 *)				2005		
	TRWI	TRWII	TRWIII	TRWIV	TRWI	TRWII	TRWIII
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(7)
1. PERTANIAN	59.755,18	60.432,87	60.884,65	61.110,55	62.979,85	63.345,29	64.045,68
a. Tanaman Pangan & Hortikultura	8.433,68	8.531,94	8.597,45	8.630,20	8.825,26	8.796,54	8.899,85
b. Perkebunan	5.538,04	5.590,11	5.624,83	5.642,18	5.763,00	5.834,16	5.810,90
c. Peternakan	8.062,44	8.172,08	8.245,17	8.281,72	8.562,13	8.662,43	8.745,51
d. Kehutanan	1.756,14	1.770,16	1.779,50	1.784,18	1.817,31	1.816,99	1.881,50
e. Perikanan	35.964,88	36.368,58	36.637,70	36.772,27	38.012,15	38.235,17	38.701,91
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	41.475,72	41.795,24	42.008,24	42.114,75	42.931,85	43.514,09	43.500,17
a. Pertambangan	28.681,25	28.898,04	29.042,56	29.114,82	29.746,73	29.973,07	29.989,94
b. Penggalian	12.794,47	12.897,20	12.965,68	12.999,93	13.185,12	13.541,02	13.510,94
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	735.749,43	744.194,41	749.824,40	752.639,40	781.736,53	792.377,05	801.182,11
a. Industri Besar/Sedang	730.321,01	738.710,00	744.302,67	747.099,00	775.966,04	786.538,47	795.286,10
b. IKKR	5.428,42	5.484,41	5.521,73	5.540,40	5.770,49	5.838,58	5.896,01
4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH	18.099,36	18.290,41	18.417,77	18.481,45	18.661,92	18.943,06	19.052,92
a. Listrik	16.315,55	16.493,11	16.611,48	16.670,67	16.817,73	17.084,68	17.194,89
b. Air Bersih	1.783,81	1.797,30	1.806,29	1.810,78	1.844,19	1.858,38	1.858,03
5. BANGUNAN	57.204,80	57.747,48	58.109,27	58.290,17	59.385,70	59.570,22	59.992,43
6. PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN	177.111,48	179.088,01	180.405,70	181.064,54	186.078,01	187.695,94	189.255,59
a. Perdagangan Besar dan Eceran	143.638,43	145.276,90	146.369,21	146.915,36	150.688,90	151.940,01	153.338,94
b. Hotel	21.267,28	21.489,55	21.637,74	21.711,83	22.667,93	22.813,15	22.929,91
c. Restoran	12.205,77	12.321,56	12.398,75	12.437,35	12.721,18	12.942,78	12.986,73
7. PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI	66.777,72	67.472,95	67.936,44	68.168,17	69.685,29	70.526,20	71.221,49
a. Angkutan	47.231,99	47.683,13	47.983,89	48.134,25	49.125,04	49.734,40	50.212,10
b. Komunikasi	19.545,73	19.789,82	19.952,55	20.033,92	20.560,25	20.791,80	21.009,39
8. KEUANGAN, PERSEWAAN & JASA PRS	69.822,76	70.645,51	71.193,99	71.468,24	72.429,24	73.349,34	73.998,12
a. Bank	15.556,64	15.873,93	16.085,45	16.191,21	15.824,83	16.151,85	16.474,25
b. Lembaga Keuangan Tanpa Bank & JPK	4.519,18	4.559,41	4.586,22	4.599,63	4.679,10	4.740,62	4.721,57
c. Sewa Bangunan	48.775,13	49.232,24	49.536,98	49.689,35	50.912,32	51.428,89	51.785,16
d. Jasa Perusahaan	971,81	979,93	985,34	988,05	1.012,99	1.027,98	1.017,14
9. JASA - JASA	47.372,21	47.791,91	48.071,69	48.211,59	48.954,71	50.078,98	50.135,92
P D R B	1.273.368,66	1.287.458,79	1.296.852,15	1.301.548,86	1.342.843,10	1.359.400,14	1.372.378,41

Sumber : BPS Batam

TABEL 2. PERKEMBANGAN INDEKS HARGA KONSUMEN (IHK) PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Jan '05 s.d Sept '05 (Tahun 2002=100)

Kelompok	Januari 05		Februari 05		Maret 05		Juli 05		Agust 05		Sept 05	
	Indeks	% Perbh.	Indeks	% Perbh.	Indeks	% Perbh.	Indeks	% Perbh.	Indeks	% Perbh.	Indeks	% Perbh.
UMUM	112.21	1.64	111.45	(0.68)	113.33	1.69	114.50	0.64	115.48	0.86	115.50	0.02
I. BAHAN MAKANAN	112.22	5.10	108.09	(2.81)	109.82	1.60	110.58	0.65	113.09	2.27	112.29	-0.71
a. Padi-padian, umbi-umbian & hasil hasilnya	129.81	7.31	134.27	3.44	134.32	0.04	130.77	0.01	130.77	0.00	130.77	0.00
b. Daging dan hasil-hasilnya	98.16	4.57	97.27	(0.91)	95.96	(1.35)	101.93	1.80	101.63	-0.29	101.72	0.09
c. Ikan segar	113.68	2.39	108.52	(4.54)	110.66	1.97	105.14	-3.23	109.20	3.86	110.50	1.19
d. Ikan diawetkan	103.82	1.86	105.91	2.01	107.38	1.39	111.30	0.16	112.87	1.41	114.24	1.21
e. Telur, susu dan hasil-hasilnya	100.25	1.52	100.33	0.08	99.39	(0.94)	101.71	0.65	102.04	0.32	102.61	0.56
f. Sayuran	127.73	12.69	98.96	(22.52)	117.38	18.61	103.81	-0.52	115.13	10.90	107.36	-6.75
g. Kacang-kacangan	111.61	0.23	112.47	0.77	114.34	1.66	113.86	0.39	114.35	0.43	114.94	0.52
h. Buah-buahan	110.58	2.12	114.89	3.90	114.06	(0.72)	112.21	0.01	113.01	0.71	115.21	1.95
i. Bumbu-bumbuan	98.21	16.06	91.45	(6.88)	90.23	(1.33)	115.59	20.56	121.85	5.42	113.11	-7.17
j. Lemak dan minyak	105.85	(2.36)	106.04	0.18	106.04	0.00	108.05	0.03	107.82	-0.21	110.81	2.77
k. Bahan makanan lainnya	116.08	0.83	117.27	1.03	117.13	(0.12)	116.75	-0.21	116.85	0.09	116.85	0.00
II. MAKANAN JADI, MINUMAN, ROKOK & TEMBAKAU	117.09	0.84	117.53	0.38	117.88	0.30	119.71	0.43	119.73	0.02	120.02	0.24
a. Makanan jadi	117.67	0.77	117.07	0.00	117.17	0.09	117.77	0.07	117.77	0.00	117.77	0.00
b. Minuman yang tidak beralkohol	117.43	2.95	120.24	2.39	122.07	1.52	119.98	-0.17	120.23	0.21	121.83	1.33
c. Rokok, tembakau dan minuman beralkohol	116.98	0.01	116.88	(0.05)	116.93	0.04	122.18	1.17	122.13	-0.04	122.21	0.07
III. PERUMAHAN	112.45	0.41	112.49	0.04	112.77	0.25	114.35	1.16	114.41	0.05	114.70	0.25
a. Biaya tempat tinggal	107.30	0.01	107.32	0.02	107.38	0.06	109.75	1.88	109.84	0.08	110.11	0.25
b. Bahan bakar, penerangan dan air	131.33	1.42	131.42	0.07	132.33	0.69	132.11	0.00	132.11	0.00	132.11	0.00
c. Perlengkapan rumah tangga	103.53	0.00	103.54	0.01	103.56	0.02	105.25	1.03	105.25	0.00	105.68	0.41
d. Penyelenggara rumah tangga	102.45	0.04	102.57	0.12	102.77	0.19	103.67	0.11	103.75	0.08	104.87	1.08
IV. SANDANG	105.38	0.75	105.23	(0.14)	105.65	0.40	108.25	1.35	108.67	0.39	109.66	0.91
a. Sandang laki-laki dewasa	100.87	0.00	100.96	0.09	100.96	0.00	101.38	0.00	101.38	0.00	101.38	0.00
b. Sandang wanita dewasa	100.40	0.00	100.38	(0.02)	100.38	0.00	100.83	0.09	100.66	-0.17	100.66	0.00
c. Sandang anak-anak	101.83	(0.26)	102.00	0.17	102.38	0.37	102.73	0.00	102.73	0.00	102.75	0.02
d. Sandang pribadi dan sandang lainnya	131.24	4.58	129.82	(0.08)	132.10	1.76	147.47	6.99	150.71	2.20	157.50	4.51
V. KESEHATAN	102.68	0.34	120.73	0.05	103.02	0.28	103.97	-0.25	104.60	0.61	105.58	0.94
a. Jasa kesehatan	110.10	0.00	110.10	0.00	111.03	0.84	111.03	0.00	111.03	0.00	111.03	0.00
b. Obat-obatan	106.15	0.00	106.10	(0.05)	105.29	(0.76)	109.63	-0.10	110.05	0.38	110.05	0.00
c. Jasa Perawatan Jasmani	102.69	0.00	102.69	0.00	102.69	0.00	102.69	0.00	102.69	0.00	102.69	0.00
d. Perawatan Jasmani dan Kosmetika	99.37	0.61	99.47	0.01	99.82	0.35	100.49	-0.40	101.45	0.96	103.13	1.66
VI. PENDIDIKAN, REKREASI & OLAH RAGA	112.08	0.00	112.16	0.07	112.16	0.00	112.83	0.46	119.74	6.12	120.22	0.40
a. Jasa Pendidikan	122.56	0.00	122.56	0.00	122.56	0.00	122.56	0.00	138.63	13.11	138.63	0.00
b. Kursus-kursus/Pelatihan	104.97	0.00	104.97	0.00	104.97	0.00	104.97	0.00	104.97	0.00	104.97	0.00
c. Perlengkapan/Peralatan Pendidikan	107.17	0.00	107.17	0.00	107.17	0.00	107.18	0.01	107.18	0.00	107.22	0.04
d. Rekreasi	103.40	0.00	103.63	0.22	103.63	0.00	105.57	1.45	105.57	0.00	106.97	1.33
e. Olahraga	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
VII. TRANSPOR & KOMUNIKASI	112.43	0.00	112.43	0.00	120.52	7.20	120.56	0.01	120.59	0.02	120.59	0.00
a. Transpor	109.68	0.00	109.68	0.00	122.68	11.80	122.76	0.02	122.81	0.04	122.81	0.00
b. Komunikasi dan pengiriman	115.80	0.00	115.80	0.00	115.80	0.00	115.80	0.00	115.80	0.00	115.80	0.00
c. Sarana dan penunjang transpor	102.17	0.00	102.17	0.00	102.28	0.11	102.28	0.00	102.28	0.00	102.28	0.00
d. Jasa Keuangan	163.09	0.00	163.09	0.00	163.09	0.00	163.09	0.00	163.09	0.00	163.09	0.00

Sumber : BPS Batam

TABEL 3. PERKEMBANGAN INFLASI KOTA BATAM, PEKANBARU DAN NASIONAL

Kota	2000	2001	2002	Q.I/03	Q.II/03	Q.III/03	Q.IV/03	Q I/04	Q II/04	Q III/04	Q IV/04	Q I/05	Q II/05	Q III/05
1. Batam	9.00	12.64	9.14	2.07	1.10	0.75	2.35	0.47	1.10	0.70	1.89	2.65	0.39	1.52
2. Pekanbaru	10.34	14.65	11.66	2.28	2.13	1.61	2.76	1.20	3.45	1.30	2.71	2.75	0.14	2.91
3. Nasional	9.35	12.55	10.03	0.77	1.23	1.24	2.50	0.91	2.35	0.49	2.46	3.19	1.05	2.03

Sumber : BPS Batam

**TABEL 4. DATA BANK UMUM
WILAYAH KERJA BANK INDONESIA BATAM**

Dlm.Juta Rp.

KETERANGAN	Periode								
	Sep-03	Dec-03	Mar-04	Jun-04	Sep-04	Des-04	Mar-05	Jun-05	Sep-05
TOTAL ASSET	6,667,257	7,301,101	7,152,303	7,787,040	8,263,392	9,000,502	9,316,232	9,715,095	10,213,912
DANA PIHAK III	5,956,975	6,385,706	6,262,926	6,758,182	7,170,586	7,721,045	7,806,495	8,120,960	8,373,778
a. Giro	2,328,630	2,404,277	2,397,720	2,745,917	2,860,737	2,997,398	3,106,069	3,183,277	3,262,739
b. Deposito	1,438,205	1,439,148	1,328,991	1,270,245	1,408,874	1,578,824	1,616,147	1,805,531	2,070,995
c. Tabungan	2,190,140	2,542,281	2,536,215	2,742,020	2,900,975	3,144,823	3,084,279	3,132,152	3,040,044
KREDIT									
a. Jenis Penggunaan	2,714,736	3,047,082	3,179,182	3,564,399	3,962,749	4,397,899	4,761,130	5,104,373	5,685,474
- Modal Kerja	1,006,579	1,107,100	1,126,377	1,276,263	1,443,452	1,654,130	1,803,592	1,848,852	1,962,136
- Investasi	706,907	888,385	922,570	1,040,264	1,137,231	1,247,028	1,359,514	1,433,060	1,712,592
- Konsumsi	1,001,250	1,051,597	1,130,235	1,247,872	1,382,066	1,496,741	1,598,024	1,822,461	2,010,746
b. Golongan Kredit	2,714,736	3,047,082	3,179,182	3,564,399	3,962,749	4,397,899	4,761,130	5,104,373	5,685,474
- KUK	781,423	744,990	765,801	776,103	780,062	797,388	794,299	787,396	757,976
- Non KUK	1,933,313	2,302,092	2,413,381	2,788,296	3,182,687	3,600,511	3,966,831	4,316,977	4,927,498
b. Jenis Kredit	2,714,736	3,047,082	3,179,182	3,564,399	3,962,749	4,397,899	4,761,130	5,104,373	5,685,474
- UMKM	1,698,932	1,832,909	1,919,795	2,128,152	2,339,215	2,536,067	2,623,049	2,828,126	3,016,067
- Non UMKM	1,015,804	1,214,173	1,259,387	1,436,247	1,623,534	1,861,832	2,138,081	2,276,247	2,669,407
c. Kolektibilitas									
- Lancar	2,250,947	2,760,331	2,751,943	3,101,721	3,481,260	3,912,608	4,267,390	4,288,212	4,615,820
- D.P.Khusus	370,945	268,665	310,379	316,388	325,490	367,920	364,458	605,892	776,895
- Kurang Lancar	61,326	40,453	61,184	42,404	50,079	26,663	21,268	46,585	63,022
- Diragukan	15,296	7,287	25,672	67,966	49,574	44,111	54,412	33,562	79,628
- Macet	16,222	24,346	30,004	35,920	56,346	46,597	53,602	130,122	150,109
RATIO									
a. Loan to Deposit Ratio (LDR)	45.57%	47.72%	50.76%	52.74%	55.26%	56.96%	60.99%	62.85%	67.90%
b. Non Performing Loans (NPL)	3.42%	2.37%	3.68%	4.10%	3.94%	2.67%	2.72%	4.12%	5.15%
c. Penyaluran KUK	28.78%	24.45%	24.09%	21.77%	19.68%	18.13%	16.68%	15.43%	13.33%
b. Penyaluran UMKM	62.58%	60.15%	60.39%	59.71%	59.03%	57.67%	55.09%	55.41%	53.05%

Sumber : Bank Indonesia Batam

**TABEL 5. DATA BANK UMUM
WILAYAH BATAM**

Dim. Juta Rp.

KETERANGAN	Periode								
	Sep-03	Dec-03	Mar-04	Jun-04	Sep-04	Des-04	Mar-05	Jun-05	Sep-05
TOTAL ASSET	4,604,321	5,049,249	5,027,493	5,574,348	6,142,177	6,703,118	7,077,782	7,601,663	8,022,161
DANA PIHAK III	3,895,984	4,172,146	4,161,054	4,564,449	5,077,299	5,458,347	5,599,666	6,049,847	6,224,301
a. Giro	1,598,767	1,706,028	1,728,127	2,041,650	2,202,758	2,299,718	2,370,210	2,468,863	2,492,805
b. Deposito	1,012,123	1,004,563	910,211	858,875	1,024,906	1,186,142	1,220,828	1,431,173	1,659,129
c. Tabungan	1,285,094	1,461,555	1,522,716	1,663,924	1,849,635	1,972,487	2,008,628	2,149,811	2,072,367
KREDIT									
a. Jenis Penggunaan	2,247,277	2,542,906	2,678,470	3,001,928	3,400,971	3,763,287	4,121,633	4,465,106	4,988,122
- Modal Kerja	735,970	799,188	838,320	953,967	1,159,585	1,330,831	1,468,905	1,563,527	1,662,105
- Investasi	652,745	830,697	862,000	972,148	1,041,932	1,137,937	1,238,569	1,314,150	1,564,101
- Konsumsi	858,562	913,021	978,150	1,075,813	1,199,454	1,294,519	1,414,159	1,587,429	1,761,916
b. Golongan Kredit	2,247,277	2,542,906	2,678,470	3,001,928	3,400,971	3,763,287	4,121,633	4,465,106	4,988,122
- KUK	637,936	619,857	641,619	633,924	636,527	632,251	628,934	616,624	597,065
- Non KUK	1,609,341	1,923,049	2,036,851	2,368,004	2,764,444	3,131,036	3,492,699	3,848,482	4,391,057
b. Jenis Kredit	2,247,277	2,542,906	2,678,470	3,001,928	3,400,971	3,763,287	4,121,633	4,465,106	4,988,122
- UMKM	1,324,621	1,412,686	1,518,976	1,685,735	1,930,859	2,083,288	2,165,864	2,387,664	2,539,087
- Non UMKM	922,656	1,130,220	1,159,494	1,316,193	1,470,112	1,679,999	1,955,769	2,077,442	2,449,035
c. Kolektibilitas	2,247,277	2,542,906	2,678,470	3,001,928	3,400,971	3,763,287	4,121,633	4,465,106	4,988,122
- Lancar	1,824,751	2,232,645	2,285,758	2,566,076	2,957,866	3,318,204	3,659,734	3,739,772	4,029,741
- D.P Khusus	337,951	250,145	288,987	300,149	297,860	338,391	344,339	527,718	742,746
- Kurang Lancar	59,564	35,480	59,398	37,858	44,462	20,746	19,622	44,873	51,316
- Diragukan	14,651	6,459	21,093	67,004	46,754	42,831	50,004	32,228	24,868
- Macet	10,360	18,177	23,234	30,841	54,029	43,115	47,934	120,515	139,451
RATIO									
a. Loan to Deposit Ratio (LDR)	57.68%	60.95%	64.37%	65.77%	66.98%	68.95%	73.60%	73.81%	80.14%
b. Non Performing Loan (NPLs)	3.76%	2.36%	3.87%	4.52%	4.27%	2.84%	2.85%	4.43%	4.32%
c. Penyaluran KUK	28.39%	24.38%	23.95%	21.12%	18.72%	16.80%	15.26%	13.81%	11.97%
d. Penyaluran UMKM	58.94%	55.55%	56.71%	56.16%	56.77%	55.36%	52.55%	53.47%	50.90%

Sumber : Bank Indonesia Batam

TABEL 6. DATA BANK UMUM
WILAYAH KEPULAUAN RIAU

dlm.juta Rp

KETERANGAN	Periode								
	Sept.2003	Des.2003	Mar.2004	Jun.2004	Sept.2004	Des.2004	Mar.2005	Jun.2005	sep.2005
TOTAL ASSET	2,062,936	2,260,852	2,124,810	2,212,692	2,121,215	2,297,384	2,238,450	2,113,432	2,191,751
DANA PIHAK III	2,060,991	2,213,760	2,101,872	2,193,733	2,093,287	2,262,698	2,206,829	2,071,113	#####
a. Giro	729,863	698,449	669,593	704,267	657,979	697,680	735,859	714,414	769,934
b. Deposito	426,082	484,242	456,817	411,370	383,968	430,208	415,695	374,358	411,866
c. Tabungan	905,046	1,031,069	975,462	1,078,096	1,051,340	1,134,810	1,055,275	982,341	967,677
KREDIT									
a. Jenis Penggunaan	467,459	504,176	500,712	562,471	561,778	604,612	639,497	639,267	697,352
- Modal Kerja	270,609	307,912	288,057	322,296	283,867	323,299	334,687	285,325	300,031
- Investasi	54,162	57,688	60,570	68,116	95,299	79,091	120,945	118,910	148,491
- Konsumsi	142,688	138,576	152,085	172,059	182,612	202,222	183,865	235,032	248,830
b. Golongan Kredit	467,459	504,176	500,712	562,471	561,778	634,612	639,497	639,267	697,352
- KUK	143,487	125,133	124,182	142,179	143,535	165,137	165,365	170,772	160,911
- Non KUK	368,972	379,043	376,530	420,292	418,243	469,475	474,132	468,495	536,441
b. Jenis Kredit	467,459	504,176	500,712	562,471	561,778	634,612	639,497	639,267	697,352
- UMKM	374,311	420,223	400,819	442,417	408,356	452,779	457,185	440,462	476,980
- Non UMKM	93,148	83,953	99,893	120,054	153,422	181,833	182,312	198,805	220,372
c. Kolektibilitas	467,459	504,176	500,712	562,471	561,778	634,612	639,497	639,267	697,352
- Lancar	426,196	473,686	466,185	535,645	523,394	594,404	607,656	548,440	586,079
- D.P. Khusus	32,994	18,520	21,392	16,239	27,630	29,529	20,119	78,174	34,149
- Kurang Lancar	1,762	4,973	1,786	4,546	5,617	5,917	1,646	1,712	11,706
- Diragukan	645	828	4,579	962	2,820	1,280	4,408	1,334	54,760
- Macet	5,862	6,169	6,770	5,079	2,317	3,482	5,668	9,607	10,658
RATIO									
a. Loan to Dept Ratio (LDR)	22.68%	22.77%	23.82%	25.64%	26.84%	26.72%	28.98%	30.87%	32.44%
b. Non Performing Loan (NPL)	1.77%	2.37%	2.62%	1.88%	1.91%	1.77%	1.83%	1.98%	11.06%
c. Penyaluran KUK	30.70%	24.82%	24.80%	25.28%	25.55%	26.02%	25.86%	26.71%	23.07%
d. Penyaluran UMKM	80.07%	83.35%	80.05%	78.66%	72.69%	71.35%	71.49%	68.90%	68.40%

Sumber : Bank Indonesia Batam
Kepri (Tj.Pinang, Tj.Uban, Karimun dan Natuna)

**TABEL 7. DATA PENGALIRAN KAS MASUK / KELUAR
DAN KEGIATAN PTTB KBI BATAM**

No	Nama Bulan	Pengaliran Masuk (Jutaan Rp)	Pengaliran Keluar (Jutaan Rp)	Pemberian Tanda Tidak Berharga (Jutaan Rp)
1	Tahun 2000	462,953.66	2,635,234.81	398,055.62
2	Tahun 2001	629,831.60	2,987,016.25	239,678.80
3	Tahun 2002	1,033,638.93	2,549,992.51	452,865.93
4	Tahun 2003	1,495,116.25	2,484,657.11	788,860.84
	Januari 2004	174,980.47	169,119.33	83,128.86
	Februari 2004	154,955.15	169,709.50	79,702.05
	Maret 2004	152,339.51	242,448.34	97,463.28
	Trw. I 2004	482,275.13	581,277.17	260,294.19
	April 2004	152,857.99	288,966.46	111,347.04
	Mei 2004	137,012.24	242,827.66	78,855.53
	Juni 2004	121,594.16	359,354.24	121,919.03
	Trw. II 2004	411,464.39	891,148.36	312,121.60
	Juli 2004	180,275.04	259,625.84	169,516.95
	Agustus 2004	160,469.24	277,640.31	152,555.05
	September	142,558.76	299,878.74	91,383.82
	Trw. III 2004	483,303.04	837,144.89	413,455.82
	Oktober 2004	134,354.00	387,480.00	84,342.00
	Nopember 2004	207,334.00	548,980.00	55,606.00
	Desember 2004	198,076.19	403,276.86	168,836.92
	Trw. IV 2004	539,764.19	1,339,736.86	308,784.92
5	Tahun 2004	1,916,806.75	3,649,307.28	1,294,656.53
	Januari 2005	205,005.66	250,477.47	134,589.81
	Februari 2005	210,216.68	355,120.71	132,907.53
	Maret 2005	225,008.47	321,391.88	141,725.89
	Trw. I 2005	640,230.81	926,990.06	409,223.23
	April 2005	184,344.20	350,837.86	96,965.36
	Mei 2005	193,099.56	296,952.62	80,157.14
	Juni 2005	167,293.98	351,735.51	75,162.38
	Trw. II 2005	544,737.73	999,525.99	252,284.87
	Juli 2005	187,939.07	315,171.45	68,621.75
	Agustus 2005	151,851.55	311,778.20	34,082.81
	Sept 2005	159,589.62	386,899.07	30,538.20
	Trw. III 2005	499,380.25	1,013,848.73	133,242.75

Sumber : Bank Indonesia Batam

TABEL 8. PERPUTARAN KLIRING BATAM, TANJUNG PINANG DAN TANJUNG BALAI KARIMUN

JENIS	Trw.I/2004		Trw.II/2004		Trw.III/2004		Trw.IV/2004		Trw.I/2005		Trw.II/2005		Trw.III/2005	
	Total	Rata-Rata Perhari	Total	Rata-Rata Perhari	Total	Rata-Rata Perhari	Total	Rata-Rata Perhari	Total	Rata-Rata Perhari	Total	Rata-Rata Perhari	Total	Rata-Rata Perhari
A. WARKAT KLIRING														
1. WARKAT (Lbr)	135,086	2,251	140,276	2,300	145,620	2,311	145,176	2,304	144,005	2,400	154,879	2,539	157,535	2,583
2. NOMINAL (Jt.Rp)	1,888,256	31,471	1,914,132	31,379	2,062,812	32,743	2,151,372	34,149	2,054,496	34,242	2,208,473	36,204	2,371,965	38,885
B. TOLAKAN KLIRING														
1. CEK KOSONG														
- Lembar	388	6	366	6	357	6	231	4	360	6	369	6	321	5
- Nominal (Jt.Rp)	9,443	157	6,209	102	8,429	134	8,940	142	11,296	188	8,456	139	7,845	129
2. BG. KOSONG														
- Lembar	675	11	693	11	620	10	500	8	500	8	618	10	660	11
- Nominal (Jt.Rp)	10,208	170	12,685	208	10,024	159	10,658	169	12,504	208	13,932	228	13,204	216
3. ALASAN LAIN														
- Lembar	578	10	556	9	524	8	367	6	570	10	637	10	653	11
- Nominal (Jt.Rp)	12,186	203	7,736	127	12,096	192	5,121	81	8,135	136	11,148	183	11,196	184
4. TOTAL TOLAKAN														
- Lembar	1,641	27	1,615	26	1,501	24	1,098	17	1,430	24	1,624	27	1,634	27
- Nominal (Jt.Rp)	31,837	531	26,630	437	30,549	485	24,719	392	31,914	532	33,536	550	32,245	529

Sumber : Bank Indonesia Batam